



**MODUL MATERI MAPABA PC PMII MOJOKERTO  
PERIODE 2024-2025**

**DISUSUN OLEH :  
BIDANG 1 PC PMII MOJOKERTO**

## **KE-PMII-AN**

### **A. Prawacana**

PMII sebagai organisasi mahasiswa yang mayoritas anggotanya merupakan muslim berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah atau selaras dengan pemahaman keagamaan NU, mengalami perjalanan yang panjang dalam pembentukannya. Lahirnya PMII tidak berjalan dengan mulus, banyak sekali hambatan dan rintangan yang harus dihadapinya. Keinginan mendirikan organisasi mahasiswa NU dari berbagai mahasiswa NU di Indonesia sangat kuat, akan tetapi PBNU tidak cepat-cepat memberikan lampu hijau.

Argumentasi dari PBNU adalah belum perlu adanya organisasi mahasiswa NU sebagai wadah dan aspirasi mahasiswa NU di berbagai perguruan tinggi, karena NU sudah memiliki organisasi bernama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). IPNU dirasa mampu untuk menjadi wadah bukan hanya untuk pelajar, tetapi juga untuk mahasiswa NU secara umum.

Akan tetapi, kemauan keras dan semangat yang tak mudah redup untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU terus bergelora, bahkan para mahasiswa NU semakin masif mensosialisasikannya ke berbagai kampus di Indonesia. Berkat kegigihan dan semangat yang kuat dari mahasiswa NU ini kemudian PBNU tidak bisa tidak memberikan lampu hijau untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU. Organisasi inilah yang kemudian memiliki nama PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Mari kita lihat secara komprehensif bagaimana latar sosio-historis perjalanan PMII.

### **B. Sosio-Historis Kelahiran PMII**

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dari 'rahim' Departemen Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pada 21 Syawal 1379 H atau 17 April 1960 M. Adapun IPNU adalah organisasi pelajar yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Dari geneologi kelahiran PMII ini saya menyebut PMII sebagai 'cucu' dari NU, karna cikal bakal lahirnya PMII adalah dari IPNU itu sendiri, yang mana IPNU merupakan 'anak kandung' atau organisasi yang lahir dari 'rahim' NU.

Ide lahirnya PMII ini berawal dari keinginan dan hasrat yang kuat di kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah dan aktivitas mahasiswa NU di Perguruan Tinggi Islam maupun umum. Hal ini wajar, mengingat realitas politik pada dasawarsa 50-an banyak lahir organisasi mahasiswa di bawah underbouw partai politik ataupun organisasi sosial keagamaan. Misalkan SEMMI (dengan PSII), KMI (dengan PERTI), IMM (dengan Muhammadiyah), dan HMI (dekat dengan Masyumi)<sup>1</sup>. Akan tetapi, karena pada konteks itu telah ada IPNU yang mana sebagian besar pengurusnya adalah mahasiswa NU, maka IPNU tidak hanya menjadi wadah pelajar NU, melainkan juga menjadi wadah bagi mahasiswa NU<sup>1</sup>.

Meskipun pada tahun 1955 mahasiswa NU di Jakarta sempat mendirikan organisasi bernama Ikatan Mahasiswa NU (IMANU), di Bandung berdiri Persatuan Mahasiswa NU (PMNU) dan di Surakarta berdiri Keluarga Mahasiswa NU (KMNU), namun organisasi ini tak berdiri lama, karna PBNU tidak cepat-cepat memberikan restu. Bisa dipahami, saat itu IPNU baru saja lahir pada tahun 1954, sementara pengurus IPNU juga banyak yang berstatus mahasiswa. Bisa dibayangkan Jika mendirikan organisasi mahasiswa NU baru akan susah untuk mengelola dan mengurus kedua organisasi yang berada di bawah naungan NU, maka dari ini dikhawatirkan IPNU tidak ada yang mengurus.

Semangat untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah mahasiswa NU terus berlanjut di muktamar II IPNU pada 1957 di Pekalongan. Namun, lagi-lagi tidak mendapatkan respon yang serius, dengan dalih bahwa IPNU yang pada saat itu masih baru terbentuk memerlukan pembenahan dan konsolidasi yang matang. Dalam perjalannya, berkat kegigihan dan perjuangan mahasiswa NU ini memperoleh solusi pada muktamar III IPNU pada 27-31 Desember 1958 di Cirebon dengan membentuk Departemen Perguruan Tinggi<sup>2</sup>. Departemen Perguruan Tinggi IPNU ini yang akhirnya menjadi wadah dan aspirasi mahasiswa NU.

---

<sup>1</sup> Modul kaderisasi pmii jatim hal 138.

Sayangnya, Departemen Perguruan Tinggi IPNU ternyata tidak bisa meredam keinginan mahasiswa NU untuk memisahkan diri, karena IPNU tidak bisa menampung aspirasi mahasiswa. Hal ini karena beberapa alasan, pertama, kondisi obyektif menunjukkan bahwa keinginan, dinamika dan gerakan mahasiswa berbeda dengan keinginan para pelajar. Kedua, dengan hanya membentuk departemen dalam IPNU, mahasiswa NU tidak bisa masuk sebagai anggota Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), sebab PPMI hanya bisa menampung ormas mahasiswa.

Ketiga, kondisi sosial-politik bangsa Indonesia mendesak agar NU mempunyai organisasi mahasiswa sebagai wadah pengkaderan intelektual maupun kepemimpinan NU. Hal ini tak lain karena NU pada konteks itu adalah sebagai pemenang ketiga dalam pemilu 1955, pada saat sama, satu-satunya wadah mahasiswa Islam hanyalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI sendiri terlalu dekat dengan masyumi yang secara politik sudah berseberangan dengan NU. Ditambah lagi Masyumi yang bermasalah dan terlibat dalam pemberontakan Partai Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemberontakan ini terjadi di tengah-tengah pergolakan politik, ketidakstabilan pemerintahan, masalah korupsi, perdebatan-perdebatan dalam konstituante, serta pertentangan dalam masyarakat mengenai konsepsi Presiden.

Perjuangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa di bawah naungan NU mencapai puncaknya ketika IPNU mengadakan Konferensi Besar (Konbes) pada 14-17 Maret 1960 di Kaliurang, Yogyakarta. Isma'il Makky (Ketua Departemen Perguruan Tinggi IPNU) dan Moh. Hartono, BA (Mantan wakil pemimpin usaha harian Pelita Jakarta) menjadi wakil mahasiswa yang berbicara di depan peserta Konbes, yang kemudian mereka pertegas keinginan mahasiswa untuk mendirikan organisasi yang mewadahi aspirasi mahasiswa NU. Kesimpulan dari konbes tersebut menghasilkan keputusan perlunya mendirikan suatu organisasi mahasiswa NU.

Langkah selanjutnya adalah membentuk panitia sponsor pendiri organisasi yang beranggotakan 13 orang. Tugas dari tim 13 ini adalah melakukan musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia yang akan bertempat di Surabaya

dengan limit satu bulan setelah keputusan Kaliurang. Ketiga belas orang tim tersebut adalah Cholid Mawardi (Jakarta), Said Budairy (Jakarta), M. Sobich Ubaid (Jakarta), M. Makmun Syukri, BA (Bandung), Hilman (Bandung), H. Ismai'il Makky (Yogyakarta), Munsif Nahrawi (Yogyakarta), Nuril Huda Suaidy HA (Surakarta), Laily Mansur (Surakarta), Abd. Wahab Jailani (Semarang), Hisbullah Huda (Surabaya), M. Cholid Narbuko (Malang) dan Ahmad Husain (Makasar).

Sebelum musyawarah dilaksanakan, tim panitia yang diwakili oleh tiga orang, yakni Hisbullah Huda, M. Said Budairy dan Makmun Sukri BA menghadap kepada Ketua Umum PBNU, KH. Dr. Idham Khalid untuk meminta do'a restu dan persetujuan ihwal pembentukan organisasi mahasiswa NU tersebut. Dalam nasehatnya, KH. Idham Khalid menyarankan agar organisasi yang akan dibentuk benar-benar dapat diandalkan sebagai kader NU dengan argumen ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa harus diamankan bagi kepentingan rakyat. Bukan ilmu untuk ilmu. Setelah memberi nasehat, Ketua Umum PBNU merestui dilaksanakannya musyawarah mahasiswa tersebut.

Selanjutnya, pada 14-16 April 1960 diselenggarakan musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia bertempat di sekolah Mu'alimat NU Wonokromo Surabaya untuk membahas tentang peresmian organisasi sesuai keputusan konbes IPNU di Kaliurang sebulan sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut sempat muncul perdebatan tentang nama organisasi yang akan dibentuk. Dari proses perdebatan itu muncul beberapa nama yang diusulkan oleh peserta musyawarah antara lain :

1. Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU), diusulkan oleh delegasi dari Jakarta.
2. Persatuan atau Perhimpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah atau Perhimpunan Mahasiswa Sunni yang diusulkan oleh delegasi dari Yogyakarta.
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang diusulkan oleh delegasi Bandung, Surabaya dan Surakarta.

Dari ketiga usulan tersebut akhirnya yang disetujui adalah nama PMII. Dalam hal ini peserta sebenarnya menyadari bahwa organisasi ini adalah organisasi kader partai NU, akan tetapi semua menghendaki agar nama NU tidak dicantumkan. Hanya saja mereka sepakat agar organisasi ini tidak terlepas dari makna filosofis “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia” dengan rumusan pemikiran sebagai berikut :

1. Mewujudkan adanya kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa, khususnya karena pada saat itu situasi politik nasional diliputi oleh semangat revolusi.
2. Menampakkan identitas ke-Islaman sekaligus sebagai kelanjutan dari konsepsi NU yang berhaluan paham Ahlussunnah wal Jamaah, juga berdasarkan perjuangan para wali di pulau Jawa yang telah sukses melaksanakan dakwahnya penuh toleransi dengan mengakulturasi budaya setempat. Mahasiswa NU diharapkan bisa mengkaji budaya untuk bisa dimanfaatkan mana yang bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam, sehingga dengan begitu nilai-nilai ajarannya bersifat akomodatif.
3. Memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan, oleh karena itu nama Indonesia harus tetap tercantum.

Dari hasil keputusan perihal penamaan PMII ini, setidaknya ada empat hal yang menarik untuk dibahas. Pertama, istilah “Pergerakan”, pada mulanya huruf “P” dalam PMII mempunyai tiga alternatif kepanjangan, yaitu pergerakan, perhimpunan, dan persatuan. Akhirnya yang dipilih adalah pergerakan (Movement/al-harakah) dengan argumentasi sifat mahasiswa yang selalu dinamis dan aktif, perubahan, mempunyai sifat bergerak secara aktif.

Kedua, mahasiswa. PMII mengartikan mahasiswa sebagai generasi muda yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terdapat tanggung jawab keagamaan, intelektual sosial kemasyarakatan dan

tanggung jawab individual sebagai hamba Tuhan maupun kader bangsa dan negara. Mahasiswa diandalkan memuat kandungan-kandungan, nilai-nilai intelektualitas, idealitas, komitmen dan konsistensi.

Ketiga, Islam. Islam yang dipahami PMII merupakan Islam ala Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai corak basis keagamaan yang ditempuh selama menimba ilmu-ilmu agama di pesantren. Di samping itu, corak keberislaman ini selaras dengan apa yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam setiap pemikiran dan sikapnya. Sebuah pemahaman Islam yang mengakulturasi budaya masyarakat setempat dengan ajaran-ajaran keislaman.

Keempat, nasionalisme dan nama Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan nama Indonesia sebagaimana terdapat dalam prinsip pemikiran poin ketiga, menunjukkan bahwa sejak awal kelahirannya, PMII sudah memberi komitmen yang kuat bagi rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan Indonesia ini juga sebagai sikap terhadap organisasi mahasiswa Islam yang lebih dulu ada yakni HMI yang tidak menegaskan nama Indonesia di dalamnya.

Musyawarah mahasiswa NU itu juga memutuskan tiga orang formatur yang diberi tugas menyusun kepengurusan. Mereka antara lain adalah Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, A. Chalid Mawardi sebagai ketua satu dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Di samping itu forum berhasil menetapkan peraturan dasar PMII yang berlaku mulai 17 April 1960. Selanjutnya tanggal inilah yang dinyatakan sebagai hari lahirnya PMII secara resmi.

Dari sini sudah jelas bahwa ide dasar pendirian PMII murni berawal dari inisiatif pemuda NU. Pilihan untuk bernaung di bawah panji NU bukanlah sekedar pertimbangan praktis, bukan pula karena kondisi saat itu dependen atau menjadi organisasi underbouw merupakan kemutlakan, tetapi jauh dari itu keterikatan PMII-NU telah terbentuk dan sengaja dibangun atas dasar

kesamaan nilai, kultur, akidah, pola pikir, bertindak, berperilaku dan cita-cita yang sama.

Meskipun pada selanjutnya PMII harus memilih independen sebagai sebuah prinsip kedewasaan dan kedinamisan organisasi, akan tetapi tidak serta merta bisa dipisahkan dengan NU, hal ini karena kesamaan visi dan cita-cita sebagaimana disebut. Adapun perihal independensi PMII ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

### **Berpengaruh di Usia Muda**

Organisasi mahasiswa yang baru terbentuk ini mulai menunjukkan gerakan-gerakan politik maupun sosial yang sangat cepat dan berpengaruh. Dalam usianya yang tergolong muda, PMII telah aktif terlibat dalam dunia kemahasiswaan dan kepemudaan baik di kancah nasional maupun internasional. Hal ini bisa dibuktikan dengan masifnya gerakan-gerakan PMII, seperti Said Budairi selaku Sekretaris Umum (PMII) pada September 1960 mewakili PMII dalam konferensi pembentukan panitia internasional forum pemuda sedunia di Moskow (Contituyente Metting for the Youth Forum). Sepulang dari Moskow, ia singgah di Mesir untuk konsolidasi dengan mahasiswa NU yang berada di luar negeri.

Begitu juga dengan Chalid Mawardi selaku Ketua I PB PMII yang pada Juni 1961 berangkat ke Moskow menghadiri forum pemuda sedunia. Hal ini membuktikan bahwa PMII bukanlah organisasi sempalan dari organisasi mahasiswa yang terlebih dahulu ada, tetapi merupakan proses lanjut dari gerakan mahasiswa Nahdliyin yang mana sebelumnya tergabung dalam Departemen Perguruan Tinggi IPNU.

Tidak hanya itu, gerakan PMII pada sekitar tahun 1966 sangat berpengaruh. Gerakan ini dimainkan oleh PMII yang memimpin gerakan-gerakan mahasiswa Indonesia. Ketika itu Zamroni sebagai ketua PB PMII dipercaya memimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melalui pertemuan yang diprakarsai oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP),

Sjarief Thajeb. Organisasi yang tergabung dalam KAMI adalah PMII, PMKRI, GMNI, dan Mapancas.

Zamroni sebagai kader PMII sangat lincah dan sigap memimpin KAMI. Terutama dalam memimpin demonstrasi mahasiswa. Pengorbanan Zamroni sampai pada konsekuensi nyata bahwa sebagai pemimpin gerakan mahasiswa, harus merelakan jemari tangannya terpotong hingga tersisa dua buah. Ini sekaligus menjadi bukti begitu besarnya pengorbanan Zamroni yang juga kader PMII dalam membela dan menggerakkan idealisme mahasiswa.

Tak hanya itu, inspirasi KAMI terhadap gerakan mahasiswa mampu memberi motivasi pada komunitas gerakan mahasiswa baru sebagai lambang perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Maka muncullah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.

Gerakan ini menjadi kebanggaan dan rasa solidaritas yang tinggi dari kalangan organisasi mahasiswa lain. PMII juga telah membuktikan bahwa mampu mengambil andil yang besar dalam menginisiasi sikap mahasiswa. Meminjam Mahbub Junaidi, bahwa tangan PMII lah yang mengayunkan garis-garis besar dan pokok-pokok statemen pembubaran PKI, apa yang terjadi setelah itu kita semua sudah tahu, likuidasi secara total dilakukan seutuhnya oleh masa rakyat yang cinta kepada Pancasila.

Kebijakan serta garis-garis yang ditentukan oleh PB PMII ketika itu, agar kader PMII harus memimpin KAMI sangat tepat. Bahwa PMII harus ikut dan memimpin KAMI mulai pusat sampai daerah. Kebijakan ini telah dibuktikan dengan cepat dan luas oleh PMII. Zamroni telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan baik pada KAMI. Itu berarti juga kepemimpinan oleh PMII.

Gerakan lain dari PMII adalah ketika sahabat Zamroni bersama 34 orang pemuda Indonesia berhasil mencetuskan deklarasi pemuda, sehingga lahirlah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), kemudian KNPI berhasil masuk

ke dalam GBHN pada sidang umum MPR 1978. Dan sampai hari ini KNPI menjadi organisasi pemuda paling berpengaruh di Indonesia.

Begitu juga pada tahun 1974 PMII bergabung ke dalam kelompok Cipayung. Kelompok yang berkomitmen untuk terus mempertahankan idealisme sebagai organisasi mahasiswa. Di situlah tempat sejumlah organisasi ekstra-universitas dengan berbagai latar sosial, ideologi dan agama mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan.

Kelompok Cipayung ini terdiri dari berbagai kelompok organisasi mahasiswa, antara lain PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan PMKRI. Kehadiran kelompok Cipayung ini sangat berharga bagi kalangan aktivis mahasiswa. Karna pada saat itu gerakan mahasiswa terus dibatasi ruang geraknya oleh kebijakan pemerintah yang otoriter. Bahkan sampai hari ini, para alumnus kelompok Cipayung bisa kita temukan di sektor-sektor pemerintahan, dosen, LSM, dan pengabdian masyarakat.

Gerakan lain PMII adalah solidaritas. Hal itu tercermin pada pembelaan PMII terhadap HMI yang terancam dibubarkan oleh presiden Soekarno. Ketika HMI yang dianggap berafiliasi dengan Masyumi mendapatkan cobaan dan terancam dibubarkan, PMII menggerakkan dan memimpin kalangan pelajar, pemuda dan mahasiswa Islam untuk melakukan solidaritas dan pembelaan.

Pembelaan PMII bersama GP Ansor pada 19-26 Desember 1964, menyelenggarakan musyawarah di kalangan pelajar dan mahasiswa Islam. Musyawarah ini menghimpun organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa Islam yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan pemuda Islam. Kemudian melahirkan organisasi federasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam yang dikenal dengan nama GEMUIS (Generasi Muda Islam).

Salah satu hasil musyawarah itu adalah usaha yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI yang sedang mengalami cobaan berat. Dari sinilah GEMUIS menghasilkan dua keputusan penting tentang usaha pembelaan

terhadap HMI dengan pernyataan; pertama, HMI bukanlah underbow dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai atau organisasi manapun. Kedua, masalah yang dihadapi HMI tidak dapat dipisahkan dari masalah keseluruhan umat Islam.

### **Independensi PMII**

Perjalanan PMII berikutnya menuntut pada kondisi sosial yang sangat dinamis. Kepekaan dan kepandaian membaca konteks sosial politik Orde Baru, membuat PMII sibuk untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam membangun gerakannya. PMII sangat peka pasca Jatuhnya rezim Orde Lama dan naiknya Soeharto sebagai Presiden RI sekaligus penguasa Orde Baru membawa kepada perubahan politik dan pemerintahan yang sangat signifikan. Pemerintahan Orde Baru berhasrat untuk mengurangi kekuatan partai-partai yang berbau ideologi dengan cara mendirikan partai tersendiri sebagai kekuatan penopang bagi kekuasaannya, yakni Golongan Karya (Golkar).

Rezim Orde Baru juga melakukan penyederhanaan Partai. Penyederhanaan dilakukan dengan cara pengelompokan (regrouping) dari sepuluh kontestan pemilu menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari (PKI, PNI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik). Kelompok kedua adalah kelompok keagamaan yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari (NU, Parmusi, PSII dan Perti). Dan kelompok ketiga adalah kelompok karya yang diwakili oleh Partai Golkar (Golkar). Dari ketiga partai tersebut, Golkar identik dengan partai penguasa, lewat Golkarlah upaya politik Soeharto mempertahankan kekuasaannya. Sementara partai-partai lain hanyalah figuran demokrasi yang juga dikendalikan oleh Soeharto.

Kebijakan pemerintah Orde Baru tersebut membuat sebuah kekuasaan yang tidak bisa dijamah apalagi dikritisi oleh masyarakat. Bentuk hegemoni pemerintah ini mengakibatkan masyarakat umum dan mahasiswa memiliki

ruang gerak yang sempit untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah. Keadaan ini tidak membuat sikap kritis warga PMII berkurang. Terhadap hal ini PMII mensosialisasikan kepada masyarakat umum dan mahasiswa beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih kritis dan analitis dalam menghadapi persolalan masyarakat dan secara tajam memiliki kepekaan dalam melihat dimensi di belakang munculnya realitas di masyarakat seperti nilai, kepentingan dan kekuasaan.
2. Mahasiswa perlu meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosialnya, yakni kesadaran tentang siapakah yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan Orde Baru.
3. Kekecewaan-kekecewaan yang dialami oleh para aktivis yang mana dulu memimpikan hasil yang sukses dan konkret di dalam memperjuangkan TRITURA, tapi kenyataannya hasil perjuangan itu semakin lama semakin menipis di bawah kekuasaan Orde Baru.

Keadaan tersebut mengharuskan PMII untuk peka dan pandai membaca realita politik yang mengerdilkan setiap komponen masyarakat termasuk partai politik selain Golkar. Dari hasil pembacaan itu, PMII berpandangan bahwa jika tetap bernaung di bawah NU yang masih berada dalam wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai organisasi mahasiswa.

Atas dasar pertimbangan ini diadakanlah Musyawarah Besar (Mubes) pada 14 Juli 1972 di Munarjati, Malang. Dari Mubes tersebut, PMII memutuskan untuk independen yang tertuang dalam Deklarasi Munarjati<sup>8</sup>. Independensi berarti sikap kemandirian, mandiri dalam gerak pemikiran maupun dalam gerak operasional organisasi. Dengan independensi ini berarti PMII sudah tidak terikat pada sikap dan tindakan siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi serta cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila. Berikut ini isi Deklarasi Munarjati :

## DEKLARASI MUJARJATI

*Bismillahirrahmanirrahim*

*“Kamu sekalian adalah sebaik-baik ummat yang dititahkan kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar”.*

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera sekaligus penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya.

Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggungjawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Bahwa perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai dengan jiwa Deklarasi Tawangmangu menurut perkembangannya merupakan sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sikap dan pembinaan rasa bertanggungjawab.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memohon rahmat Allah SWT, dengan ini menyatakan diri sebagai Organisasi “Independen” yang tidak terkait tindakannya kepada siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila.

Tim Perumus Deklarasi Munarjati:

1. Umar Basalim (Jakarta)
2. Madjidi Syah (Bandung)
3. Slamet Efendi Yusuf (Yogyakarta)
4. Man Muhammad Iskandar (Bandung)
5. Choirunnisa Yafzham (Medan)
6. Tatik Farichah (Surabaya)
7. Rahman Idrus
8. Muis Kabri (Malang)

*Musyawarah Besar PMII Ke-2 Munarjati,  
Malang Jawa Timur tanggal 14 Juli 1972.*

Banyak asumsi-asumsi dari berbagai kalangan ihwal independensi PMII ini, dimulai dari aspek politis, idealis dan filosofis. Intinya ada tiga poin asumsi perihal motivasi PMII mengambil sikap independen yang bisa dirumuskan ke dalam beberapa argumentasi berikut. Pertama, adalah kedewasaan. Melihat realita politik saat itu, PMII dituntut untuk dewasa, mempertahankan idealisme dan moral mahasiswa agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis. Jika tetap bernaung di bawah NU yang masih berada dalam wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai organisasi mahasiswa.

Kedua, suatu sikap dari manifestasi rasa kecewa PMII terhadap NU karena kader-kader PMII yang berkualifikasi bagus tidak pernah diberi kesempatan untuk duduk di legislatif maupun eksekutif. Padahal, NU yang ketika itu sebagai partai politik seharusnya memperhatikan keluhan PMII. Singkatnya, independensi hanya persolan pembagian kursi.

Ketiga, adalah sebuah taktik. Kondisi politik pasca Orde lama sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Sudah banyak bukti penyokong Orde Baru dibalik menjadi 'buronan politik', maka independensi merupakan jalan satu-satunya untuk mencari selamat. Jika benar NU dibubarkan berbarengan dengan sistem penyederhanaan partai, PMII masih tetap hidup. Sebab, bukan lagi bagian dari NU. Singkatnya ini berarti independensi bermotif politik.

Dari ketiga asumsi tersebut, motivasi pada poin kedua dan ketiga itu jelas kurang pas jika dihadapkan pada hakekat PMII sebagai organisasi mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme mahasiswa. Karena itu, motif pertama sebagai proses pendewasaan yang kemudian membawa PMII dan NU pada persamaan ideologi, kultur, tradisi, akidah, dan nilai-nilai yang kemudian Chalid Mawardi menyebutnya dengan istilah Interdependensi adalah alasan yang paling rasional. Berikut ini manifestasi independensi PMII :

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera, selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bahwa Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggungjawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Bahwa pada dasarnya pengisian kemerdekaan adalah didukung oleh kemampuan intelektual manusiawi dengan sosialisasi ilmu ke sikap kultural guna mengangkat martabat dan derajat bangsa. Bahwa pada hakekatnya “independensi” sebagaimana telah dideklarasikan di MUNARJATI adalah merupakan manifestasi keadaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang meyakini sepenuhnya terhadap tuntutan-tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berpikir dan pembangunan kreativitas yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Bahwa “independensi” Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dimaksudkan dalam mendinamiskan dan mengembangkan potensi kultural yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam untuk terbentuknya pribadi luhur dan bertaqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta bertanggungjawab dalam perjuangan nasional berdasarkan Pancasila. Bahwa dengan “independensi” Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tersedia adanya kemungkinan-kemungkinan alternatif yang lebih lengkap lagi bagi cita-cita perjuangan organisasi yang berlandaskan Islam dan berhaluan Ahlul-sunnah wal Jama'ah.

*Kongres V PMII*

*Ciloto Jawa Barat Tanggal 28 Desember 197*

Keputusan independen PMII ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan, terutama dari kalangan kader NU sendiri. Respon para Kyai, dan tokoh NU

bermacam-macam dengan berbagai argumentasi masing-masing. Ada yang pro ada yang kontra. Yang pro misalkan seperti Said Budairy yang beranggapan bahwa independensi PMII harus dimaklumi, sebab dengan keadaan politik saat itu PMII ingin tetap eksis dan berkiprah di dunia kepemudaan dan kemahasiswaan, karena lepas dari organisasi induknya. Yang kontra misalkan, Chalid Mawardi melihat NU dalam perspektif sebagai kekuatan politik. Dengan memisahkannya PMII dari NU berarti pengkaderan dalam tubuh NU akan terputus. Padahal NU membutuhkan kader-kader politik di masa depan. Reaksi lain juga muncul dari para Kyai, bahwa dengan memisahkannya PMII dan NU, maka NU tidak lagi bisa mengontrol PMII. Sehingga nantinya dikhawatirkan di PMII akan berkumpul antara putra dan putri, padahal tradisi pesantren selalu memisahkan antara putra dan putri.

### **Interdependensi PMII-NU**

Kurang lebih 12 tahun lamanya PMII menjadi underbouw NU, berkhidmat dalam politik praktis hingga sampai pada akhirnya menyatakan independen. Akan tetapi, antara PMII dan NU memiliki persamaan-persamaan dalam paham keagamaan dan perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan serta ikatan historis. Di samping itu antara PMII dan NU juga memiliki keterkaitan atas dasar kesamaan nilai, cita-cita, kultur, tradisi, ideologi maupun akidah. Poinnya, bahwa sikap PMII untuk independen ternyata tidak sepenuhnya memisahkan ormas mahasiswa ini dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Independensi ditafsirkan sebagai interdependensi sebagaimana istilah yang ditawarkan Chalid Mawardi. Interdependensi PMII-NU merupakan suatu sikap yang tidak saling mengintervensi secara struktural dan kelembagaan, tetapi memiliki visi dan tujuan yang sama. Suatu sikap ini menjadi unik bagi PMII, karna bisa jadi merupakan satu-satunya ormas mahasiswa yang mempunyai istilah Interdependen.

Oleh karena itu, untuk melahirkan keraguan dan saling curiga maka hubungan itu harus dijalin kembali. Bukan hubungan hierarki struktural,

melainkan hubungan kesamaan tujuan dan citacita dengan mengedepankan kedaulatan organisasi penuh. Deklarasi interdependensi PMII-NU kemudian dicetuskan dalam Kongres X PMII pada tanggal 27 Oktober 1991 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Berikut ini Deklarasi Interdependensi PMII-NU :

### **DEKLARASI INTERDEPENDENSI PMII-NU**

*Bismillahirrahmanirrahim*

1. Sejarah telah membuktikan bahwa PMII adalah dilahirkan dari pergumulan mahasiswa yang bernaung di bawah kebesaran NU, dan sejarah juga telah membuktikan bahwa PMII telah menyatakan independensinya melalui Deklarasi Munarjati tahun 1972.
2. Kerangka berpikir, perwatakan dan sikap sosial antara PMII dan NU mempunyai persamaan karena dibungkus pemahaman Islam ala Ahlussunnah wal Jama'ah.
3. PMII insaf dan sadar bahwa dalam melakukan perjuangan diperlukan untuk saling tolong menolong "ta'awanu 'ala-l-birri wattaqwa", ukhuwah Islamiyah (Izzul Islam wal muslimin) serta harus mencerminkan "mabadi khoiru ummah" (prinsip-prinsip umat yang baik), karena itulah PMII siap melakukan kerjasama.
4. PMII insaf dan sadar bahwa arena dan lahan perjuangannya adalah sangat banyak dan bervariasi sesuai dengan nuansa usia, zaman, dan bidang garapannya.

Karena antara PMII dan NU mempunyai persamaan-persamaan di dalam persepsi keagamaan dari perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan, ikatan historis, maka untuk menghilangkan keragu-raguan, ketidakmenentuan serta rasa saling curiga, dan sebaliknya untuk menjalin kerja sama program secara kualitatif dan fungsional, baik secara program nyata maupun penyiapan sumber daya manusia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyatakan siap untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan NU atas dasar prinsip kedaulatan organisasi penuh, INTERDEPENDENSI, dan tidak ada intervensi secara struktural-kelembagaan, serta prinsip mengembangkan masa depan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia.

Kongres X PB PMII Pondok Gede  
Jakarta, Tanggal 27 Oktober 1991

Untuk mempertegas Deklarasi Interdependensi PMII-NU, maka PMII melalui Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) PB PMII tanggal 24 Desember 1991 di Cimacan, Jawa Barat, merumuskan implementasi interdependensi PMII-NU. Pemikiran tersebut atas dasar sebagai berikut. Pertama, bahwa dalam pandangan PMII ulama sebagai pewaris para Nabi merupakan panutan karena kedalaman ilmu keagamaannya. Interdependensi ditempatkan pada konteks keteladanan ulama dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, adanya ikatan historis yang mempertemukan PMII dan NU. Fakta sejarah menyatakan bahwa cikal bakal kelahiran PMII dan perkembangannya tidak lepas dari peran NU, demikian juga latar belakang sebagian besar warga PMII merupakan warga NU, sehingga memengaruhi cara pikir dan bertindak warga PMII. Adapun pilihan independen PMII tidak dipahami sebagai upaya mengurangi apalagi menghapus makna kesejarahan PMII-NU.

Ketiga, adanya persamaan paham keagamaan antara PMII dan NU. Keduanya sama-sama mengembangkan suatu paham wawasan keislaman Ahlussunnah wal Jama'ah. Implementasi paham Aswaja tersebut tampak juga antar keduanya pada persamaan sikap sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip tawasut, i'tidal, tasamuh dan tawazun. Demikian juga pola pikir dan sikap selektif, akomodatif, integratif sesuai prinsip Al-Muhafadzatu ala-l-Qadimi-l-shalih wa-l-Ahdu bi-l-Jadidi-l-Ashlah.

Keempat, adanya persamaan kebangsaan. Bagi PMII keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap orang muslim Indonesia. Atas dasar tersebut, maka merupakan keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dengan segala tekad dan kemampuan baik secara individu maupun kelompok.

Kelima, adanya kesamaan kelompok sasaran. PMII dan NU memiliki mayoritas anggota dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Di samping itu, berangkat dari kalangan pedesaan dan basis pendidikan pesantren.

Kesamaan lahan perjuangan ini kemudian melahirkan format perjuangan yang relatif sama.

### C. Arti dan Makna Filosofis Lambang PMII

Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu Pergerakan, Mahasiswa, Islam dan Indonesia. Makna **Pergerakan** yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekholidahannya.

Pengertian **Mahasiswa** adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggungjawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggungjawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

**Islam** yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan atau paradigma Ahlu Sunnah wal Jama‘ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara Iman, Islam dan Ihsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integrative. Islam terbuka, progresif dan transformative demikian plat-form PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah suatu rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized).

Sedangkan pengertian “Indonesia” adalah Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD “45.

#### **Arti lambang dan bendera PMII**

Pencipta Lambang PMII: Sahabat H. Said Budairy

<b>Makna Lambang</b>		
<b>No</b>	<b>Lambang</b>	<b>Arti</b>
1	Bentuk Perisai	Berarti ketahanan dan kemampuan mahasiswa Islam pada beragam rintangan dan pengaruh dari luar.
2	Bintang	Melambungkan ketinggian dan semangat harapan yang terus memancar.
3	Lima bintang sebelah atas	Menggambarkan Rasulullah SAW dengan 4 sahabat terkemuka (Khulafaur Rasyidin).
4	Empat bintang sebelah bawah	Menggambarkan empat mazhab yang berhaluan Ahlusunnah wal Jama'ah.
5	Bintang 9 dalam lambang	Sembilan orang terkemuka penyebar Agama Islam di Indonesia yang disebut Walisongo.
6	Warna biru tua dalam tulisan PMII	Memperlihatkan kedalaman ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki dan digali oleh setiap kader PMII.
7	Warna biru muda yang menjadi warna dasar perisai sebelah bawah	Berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti dan takwa
8	Warna kuning	Memiliki arti identitas kemahasiswaan yang menjadi karakter dasar pergerakan lambang kebesaran dan semangat yang selalu berpijar dan penuh asa menyongsong masa depan.

### **Bendera PMII**

Pencipta Bendera PMII: Sahabat Shaimoery Ws.

- Ukuran : 4 : 3 (panjang x lebar)
- Warna dasar : Kuning
- Isi bendera : Lambang PMII terletak di bagian tengah dan tulisan PMII terletak di sebelah kiri lambang membujur ke bawah.
- Penggunaan : Bendera PMII digunakan pada upacara-upacara resmi organisasi baik intern maupun ekstern dan upacara nasional.

#### **D. Trilogi PMII**

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan nilai-nilai yang diperjuangkannya yang berbeda dengan organisasi mahasiswa lainnya pasti memiliki pola gerak yang berbeda juga. PMII dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pergerakan mempunyai pola gerak yang termaktub dalam Trilogi PMII. Trilogi PMII merujuk pada nilai-nilai yang diperjuangkan PMII, yakni nilai-nilai bernegara dan nilai beragama. Trilogi PMII adalah Tri Motto, Tri Komitmen, dan Tri Khidmat.

1. Tri Motto mencakup tiga aspek, yakni Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh. Ketiga hal tersebut wajib tertanam pada diri setiap kader PMII guna sebagai arah melangkah dalam menjani kehidupan didunia sebagai khalifah fil ard. Selalu mengingat akan keberadaan sang Kholiq pemberi petunjuk. Kemudian menafsirkan setiap petunjuk tersirat dari-Nya. Dan mengimplementasikan dalam wujud amal sholeh. Inilah bentuk penerapan dari Tri Motto yang penting untuk difahami.
2. Tri Komitmen yakni berupa Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan. Kader PMII yang juga merupakan seorang Organisator berkewajiban mengimplementasikan Tri Komitmen. Jujur sebagai bentuk tanggungjawab kepada Allah SWT. Kebenaran dalam berucap dan bertidak. Serta adil dalam memihak, agar kedamaian dapat terjaga. Ketiga hal tersebut merupakan sutau bentuk pertanggungjawaban terhadap dimensi yang berbeda-beda. *Habblum minnallah, Habblum minnan nass, dan Habblum minal alam.*
3. Tri Khidmat tersusun dari tiga kata, Taqwa, Intelektual, dan Profesional. Yang merupakan kapasitas diri yang wajib dimiliki oleh setiap kader PMII. Dengan kapasitas diri seperti itu, para kader PMII diharapkan faham siapa, apa, dan bagaimana diri mereka dengan melihat kondisi yang ada. Dalam menjalankan tugas dan menjaga fungsi, sublimasi Tri Khidmat pada tataran batin menjadi penting. Taqwa akan membawa pada pemahaman melaksanakan perintah Allah SWT, yang kemudian didukung oleh kadar intelektual yang cukup

sehingga tumbuh kesadaran dalam menjalankan perintah Allah SWT. Sehingga nampaklah sifat profesionalisme. Hal seperti inilah yang harus terjadi pada diri setiap kader PMII ketika telah menjalankan amanat disetiap struktur keorganisasian, baik dalam struktur keorganisasian PMII maupun organisasi-organisasi lain.

#### **E. Tujuan PMII**

Berdirinya PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang lahir pada tahun 1960 M (1379 H) mempunyai sebuah tujuan yang jelas di setiap gerakannya. Tujuan didirikannya PMII ini tercatat dengan tegas dalam AD PMII Bab IV Pasal 4, yang berbunyi :

“Terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berbudi luhur, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”.

Pertama, pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT. Arti pribadi muslim di sini adalah angkatan muda yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, yang memiliki kepercayaan pertalian transenden berbentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Wujud ketakwaan itu bisa tercerminkan dari perilaku dan tindakan sehari-hari sesuai dengan tuntunan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Kedua, berbudi luhur, yang memiliki arti kapabilitas seseorang supaya bisa membandingkan mana yang betul dan salah. Luhur sendiri memiliki makna kemampuan mendatangkan cipta, rasa, karsa dan kreasi yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu berbudi luhur memiliki kandungan pemahaman kemampuan mencipta, rasa, karsa dan kreasinya yang selalu diperuntukkan untuk kebermanfaatan seseorang dan lingkungan tanpa merugikannya.

Ketiga, berilmu, adalah memiliki pengetahuan ; berpengetahuan ; pintar. Kontradiksi dari memiliki ilmu yaitu ketidaktahuan, karena itu setiap manusia diharuskan untuk menuntut pengetahuan supaya terbebas dari ketidaktahuan, karena ketidaktahuan salah satunya pemicu pokok manusia terperosok ke

dalam kemaksiatan, kemusyrikan, kemiskinan bahkan juga kekafiran. Rasulullah Saw telah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim". (HR. Ibnu Majah).

Keempat, cakap, adalah kebolehan dan kecerdasan untuk melaksanakan suatu hal. Di zaman teknologi ini manusia dituntut untuk sanggup melaksanakan semua sesuatunya, syarat yang perlu disanggupi supaya kemampuan itu dipunyai yaitu kecerdasan dari manusia itu sendiri.

Kelima, bertanggung jawab mengamalkan ilmunya. Tujuan dasar dari menuntut pengetahuan adalah mempraktikkannya, karena itu untuk tiap individu muslim yang menuntut pengetahuan berkewajiban dan bertanggung jawab mempraktikkannya. Mempraktikkan pengetahuan menjadi pertanda atas nikmat Allah SWT berbentuk pengetahuan yang dengannya Allah SWT akan menambahkan ilmu sebagai tambahan nikmat atasnya. Dalam Al-Qur'an surat Ibrahim Allah berfirman:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya bila kamu mengucapkan syukur, tentu kami akan menambahkan (nikmat) kepada kamu". (QS. Ibrahim: 7).

Keenam, komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Indonesia hadir dan ada karena perjuangan para pendahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan, kemerdekaan itu tidak diambil secara mudah tetapi dengan tetes darah para pejuang bangsa. Dalam rangka menghargai para pendahulu kita, hal yang dapat dilaksanakan oleh angkatan muda sekarang ini adalah memiliki komitmen untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yaitu dengan menjaga kedaulatan NKRI dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.

## **F. Pengurus PB PMII dari masa ke masa**

1. Mahbub Junaidi (Periode 1960–1967)
2. Muhammad Zamroni (Periode 1967-1973)
3. Abduh Paddare (Periode 1973-1977)
4. Ahmad Bagja (Periode 1977-1981)
5. Muhyiddin Arubusman (Periode 1981-1984)
6. Suryadharma Ali (Periode 1985-1988)
7. Muhammad Iqbal Assegaf (Periode 1988-1991)
8. Ali Masykur Musa (Periode 1991-1994)
9. Muhaimin Iskandar (Periode 1994-1997)
10. Syaiful Bahri Anshori (Periode 1997-2000)
11. Nusron Wahid (Periode 2000-2003)
12. A Malik Haramain (Periode 2003-2005)
13. Herry Azzumi (Periode 2005-2008)
14. Muhammad Rodli Kaelani (2008-2011)
15. Addin Jauharuddin (2011-2014)
16. Aminuddin Ma'ruf (2014-2017)
17. Agus Herlambang (2017-2021)
18. Muhammad Abdullah Syukri (2021-2024)
19. Muhammad Shofiyullah Cokro (saat ini)

## NILAI DASAR PERGERAKAN

### A. Sejarah NDP

Pada tahun 1973 kongres PMII yang dilaksanakan di bogor menghasilkan keputusan pentingnya merumuskan kembali Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Penulisan NDP PMII di nilai sangat penting bagi keberlanjutan dan tumbuh kembang organisasi PMII.

Secara historis, NDP PMII mulai terbentuk pasca independensi PMII ketika mukernas III di bandung, yaitu tanggal 1 Mei 1976. Pada saat itu penyusunan NDP masih berupa kerangkanya saja, kemudian diserahkan kepada tim PB PMII. Namun, hingga menjelang Kongres PMII VIII di Bandung, penyusunan tersebut belum dapat diwujudkan. Hingga akhirnya saat Kongres PMII VIII di Bandung pada 16-20 Mei 1985, pada saat itu menetapkan penyempurnaan rumusan NDP PMII usai Surya Dharma Ali terpilih menjadi ketua umum. Adapun kerangka NDP hasil Muskernas PMII di Bandung tersebut meliputi: Bab I Pendahuluan (berisi Kerangka Landasan NDP PMII), Bab II (menerangkan Universalitas Islam, Paham Aswaja, Pandangan Aswaja Tentang Masyarakat, Negara, dan Bernegara di Indonesia), dan Bab III Penutup.

Untuk menindak lanjut hasil mukernas tersebut, tim PMII Solo menyelenggarakan beberapa kegiatan, di antaranya diskusi, konsultasi kepada sejumlah kiai, dan lokakarya hasil perumusan NDP. Diskusi kader PMII Solo kala itu diwadahi dalam DSC (Dinamika Studi Club) yang berpusat di sekretariat PMII Solo, yang kala itu masih berada di Kantor PCNU Surakarta, yang beralamatkan Jl Honggowongso Panularan Serengan.

Ada beberapa alasan kenapa harus memilih kader dari Surakarta (Solo), alasan tersebut diantara karena di Surakarta (Solo) banyak tokoh `Ulama besar yang juga sebagai akademisi (KH. Baidlowi, KH. Luqman Suryani, H. Mustahal Ahmad, dan sebagainya), Solo juga sebagai titik munculnya gagasan perumusan NDP PMII ini. Selain kota Solo, kota Jember dan Yogyakarta juga di sebut sebagai kota yang memiliki peran dalam hal tersebut.

Sejak saat itulah, perumusan NDP mulai berjalan. Tim yang diketuai oleh sahabat Nuhkbah El Mankhub (Ketua PC PMII Surakarta 1982-1983) terus melakukan diskusi rutin, konsultasi, dan sowan pada para kyai untuk menemukan rumusan NDP PMII. Selain itu, Pengurus Cabang PMII didorong untuk mengadakan seminar dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan perumusan NDP. Bahkan, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari pemateri pada saat acara Mapaba dan PKD yang sesuai dengan perumusan NDP itu dikumpulkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyusunan NDP PMII benar-benar serius.

Setelah proses perumusan NDP yang berjalan selama hampir dua bulan tersebut, terhitung sejak dikeluarkan SK PB PMII (April 1986) terkait pembentukan tim pembantu penyiap bahan NDP PMII dari tim PMII Solo tersebut, hingga diadakan Lokakarya Hasil Perumusan NDP di bulan Mei 1986, akhirnya konsep NDP PMII berhasil diselesaikan.

Hasil konsep NDP dari PC PMII Solo yang juga telah dibahas oleh tim yang dibentuk PB PMII ini, kemudian diajukan dan diputuskan di Kongres ke-IX PMII tanggal 14-19 September 1988 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Ya, memang sudah seharusnya di arena Kongres-lah, para kader PMII beradu ide dan gagasan dan bukan sekadar menjadi momen pergantian estafet jabatan.

## **B. Terminologi NDP**

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah nilai-nilai yang secara mendasar merupakan sublimasi nilai-nilai ke-Islaman, seperti kemerdekaan (al-hurriyyah), persamaan (al-musawa), keadilan ('adalah), toleran (tasamuh), damai (al-shuth), dan ke Indonesiaan (pluralisme suku, agama, ras, pulau, persilangan budaya) dengan kerangka paham ahlussunah wal jama' ah yang menjadi acuan dasar pembuatan aturan dan kerangka pergerakan organisasi.

NDP merupakan pemberi keyakinan dan pembenar mutlak, Islam mendasari dan memberi spirit serta elan vital pergerakan yang meliputi iman (aspek aqidah), Islam (aspek syariah), ihsan (aspek etika, akhlaq dan tasawuf) dalam rangka memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akherat. Dalam

upaya memahami, menghayati dan mengamalkan Islam tersebut, PMII menjadikan ahlussunah wal jama'ah sebagai manhaj al-fikr sekaligus manhaj al-taghayyur al-ijtima'i (perubahan sosial) untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi bentuk-bentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran-ajaran agama yang toleran, humanis, anti-kekerasan, dan kritis transformatif.

Ibarat orang muslim, NDP itu adalah Al-Qur'an-nya PMII, jadi ke mana pun kader-kader melangkah tidak boleh lepas dari NDP. Manusia sebagai mandataris Tuhan (khalifah fil ardh), tentunya memiliki fungsi untuk mengabdikan kepada Allah, namun lebih daripada itu manusia juga harus mampu menjaga hubungan baik dengan manusia, dan juga dengan alam sebagai sesama makhluk Tuhan.

### **C. Fungsi NDP**

Secara esensial NDP ini adalah suatu sublimasi nilai keislaman dan ke-Indonesia-an dengan kerangka pemahaman ahlussunnah wal jamaah yang memberi arah dan pendorong serta penggerak kegiatan-kegiatan PMII. Maka dari itu NDP memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Kerangka Refleksi (landasar berpikir). Sebagai kerangka refleksi NDP bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma, nilai-nilai yang akan memperkuat level kebenaran-kebenaran ideal. Subtansi ideal tersebut menjadi suatu yang mengikat, absolut, total, universal berlaku menembus ruang dan waktu (muhlamul qat'i) kerangka refleksi ini menjadi moralitas gerakan sekaligus sebagai tujuan absolut dalam mencapai nilai-nilai kebenaran, kemerdekaan, kemanusiaan.
2. Kerangka Aksi (landasan berpijak). Sebagai kerangka aksi NDP bergerak dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, analisis sosial untuk mencapai kebenaran faktual. Kebenaran sosial ini senantiasa bersentuhan dengan pengalaman historis, ruang dan waktu yang berbeda dan berubah. Kerangka aksi ini memungkinkan warga pergerakan menguji, memperkuat dan bahkan memperbaharui rumusan kebenaran historisitas atau dinamika sosial yang senantiasa berubah.

3. Kerangka Ideologis (Motivasi). Kerangka ideologis menjadi rumusan yang mampu memberikan proses ideologisasi disetiap kader, sekaligus memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses progressif dalam perubahan sosial. Kerangka ideologis juga menjadi landasan pola pikir dan tindakan dalam mengawal perubahan sosial yang memberikan tempat pada demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

#### **D. Kedudukan NDP**

Pertama, NDP menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivitas pergerakan. Kedua, NDP menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dari kebebasan berfikir, berucap, bertindak dalam aktivitas pergerakan.

#### **E. Rumusan NDP**



##### **1. Tauhid**

Meng-Esa-kan Allah SWT, merupakan nilai paling asasi yang dalam sejarah agama samawi telah terkandung sejak awal keberadaan manusia. Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan-Nya. Allah menciptakan, memberi petunjuk, memerintah, dan memelihara alam semesta ini. Allah juga menanamkan pengetahuan, membimbing dan menolong manusia.

Keyakinan seperti itu merupakan keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari pada alam semesta, serta merupakan kesadaran dan keyakinan kepada yang ghaib. Oleh karena itu, tauhid merupakan titik puncak, melandasi, memadu, dan menjadi sasaran keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan

dalam perbuatan. Maka konsekuensinya Pergerakan harus mampu mewujudkan nilai-nilai Tauhid dalam berbagai kehidupan baik berbentuk perilaku dan perjuangan. Dalam memahami dan mewujudkan itu, Pergerakan telah memiliki Ahlussunnah wal jama'ah sebagai metode pemahaman dan penghayatan keyakinan itu.

## **2. Hubungan Dengan Allah**

Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia di hadapan ciptaan-Nya yang lain. Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsi sebagai khalifah dan hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia memberanikan diri untuk mengemban amanat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhluk-Nya. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan-Nya. Untuk itu, manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang harus selalu dirawat, jika manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah.

Dengan demikian, dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah, terdapat dua pola hubungan manusia dengan Allah, yaitu pola yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah. Kedua pola ini dijalani secara seimbang, lurus dan teguh, dengan tidak menjalani yang satu sambil mengabaikan yang lain. Manusia baru dikatakan berhasil dalam hubungannya dengan Allah apabila kedua fungsi ini berjalan secara seimbang. Pemaknaan seimbang di sini bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, tetapi nilai-nilai ibadah itu harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, membangun peradaban umat manusia yang berkeadilan. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari jalan keselamatan bagi diri kita

saja, tetapi juga bagi orang lain terutama keluarga dan masyarakat sekitar kita.

### **3. Hubungan Manusia Dengan Manusia**

Sungguh tidak ada manusia yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya, kecuali ketakwaannya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada yang menonjol pada potensi kebaikannya, ada pula yang terlalu menonjol potensi kelemahannya. Karena kesadaran ini, manusia harus saling menolong, saling menghormati, bekerja sama, saling menasihati dan saling mengajak kepada kebenaran demi terciptanya tatanan kehidupan untuk kebaikan bersama.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam hubungan antar manusia ini tercakup dalam persaudaraan antar insan pergerakan, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama umat beragama dan persaudaraan antar manusia. Dalam konteks Indonesia, kita hidup penuh persaudaraan bersama umat yang berbeda agama, suku, ras, bahasa dan adat istiadat. Persaudaraan ini harus menempatkan insan pergerakan pada posisi yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk diri dan lingkungannya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

Tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya, kecuali karena ketakwaannya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, ada yang menonjol pada diri seseorang tentang potensi kebaikannya, tetapi ada pula yang terlalu menonjol potensi kelemahannya, agar antara satu dengan yang lainnya saling mengenal, selalu memadu kelebihan masing-masing untuk saling kait-mengait atau setidaknya manusia harus berlomba dalam mencari dan mencapai kebaikan, oleh karena itu manusia dituntut untuk saling menghormati, bekerja sama, tolong menolong, menasihati, dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama.

#### **4. Hubungan Manusia dengan Alam**

Sebagaimana manusia, alam semesta juga merupakan ciptaan Allah. Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. Alam menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. Allah menundukkan alam bagi manusia dan bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadi, maka manusia akan terjebak ke dalam penghambaan terhadap alam, dan bukan penghambaan kepada Allah.

Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu manusia harus menjadikan bumi maupun alam sebagai wahana dalam bertauhid dan menegaskan keberadaannya, bukan malah menjadikan alam sebagai obyek eksploitasi. Dalam memanfaatkan alam, diperlukan ilmu pengetahuan, karena alam memiliki ukuran, aturan dan hukum tersendiri. Alam didayagunakan dengan tidak mengesampingkan aspek pelestariannya. Di sinilah manusia dituntut untuk mempertajam akalnya dengan pengetahuan-pengetahuan sains guna mengelola alam dan seisinya

## SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

### A. Pra-Kolonial

Masa pra-kolonial adalah masa sebelum bangsa-bangsa eropa datang dan menjajah nusantara. Pada masa ini, terdapat perkembangan kerajaan-kerajaan di nusantara yang memiliki pengaruh dan wilayah yang luas. Beberapa contoh kerajaan tersebut adalah Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram.

Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya berkuasa secara politik, tetapi juga berperan dalam memajukan peradaban, budaya, dan agama di nusantara. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat penyebaran agama buddha dan ilmu pengetahuan di asia tenggara. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di kawasan ini. Kerajaan Mataram dikenal sebagai kerajaan yang mengembangkan agama Islam dan kesenian Jawa. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional pada masa pra-kolonial antara lain adalah:

#### 1. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang mempersatukan bangsa indonesia. Meskipun terdapat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat nusantara, seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain-lain, namun semua agama tersebut mengajarkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang sama. Agama juga menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan karya-karya seni dan budaya yang khas Nusantara.

#### 2. Bahasa

Bahasa merupakan salah satu faktor yang membedakan bangsa indonesia dengan bangsa lain. Bahasa indonesia berasal dari bahasa melayu yang merupakan bahasa *lingua franca* atau bahasa perantara di nusantara. Bahasa melayu dipilih sebagai bahasa nasional karena dianggap mudah dipelajari dan dipahami oleh berbagai suku bangsa di nusantara. Bahasa indonesia juga mengandung unsur-unsur dari bahasa-bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing yang menunjukkan kekayaan dan keberagaman bangsa Indonesia.

### 3. Budaya

Budaya merupakan salah satu faktor yang menunjukkan keunikan dan keindahan bangsa Indonesia. Budaya Indonesia merupakan hasil dari akulturasi atau percampuran antara budaya asli Nusantara dengan budaya asing yang datang melalui jalur perdagangan. Budaya Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti seni, sastra, musik, tari, arsitektur, pakaian, makanan, adat istiadat, dan lain-lain. Budaya Indonesia juga mengandung nilai-nilai luhur dan filosofi hidup yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menyatukan diri pada masa pra-kolonial antara lain adalah:

#### 1. Persaingan antar Kerajaan

Persaingan antar kerajaan di Nusantara sering kali menimbulkan konflik dan peperangan yang mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun moral. Persaingan antar kerajaan juga menghambat terciptanya persatuan dan kesatuan di antara bangsa-bangsa di Nusantara.

#### 2. Serangan dari luar

Serangan dari luar merupakan ancaman bagi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di Nusantara. Beberapa contoh serangan dari luar adalah serangan Mongol pada masa Majapahit, serangan Portugis pada masa Malaka, serangan Spanyol pada masa Ternate-Tidore, dan serangan Aceh pada masa Mataram.

#### 3. Perpecahan internal

Perpecahan internal merupakan akibat dari ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat di Nusantara. Perpecahan internal dapat berupa pemberontakan, separatis, atau gerakan keagamaan yang menentang kebijakan atau otoritas kerajaan. Perpecahan internal juga dapat memicu intervensi dari pihak asing yang ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan mereka.

## **B. Masa Kolonial**

Masa kolonial adalah masa ketika bangsa-bangsa eropa datang dan menjajah Nusantara di tahun 1509. Pada masa ini, terdapat penjajahan oleh bangsa-bangsa, seperti portugis, spanyol, belanda, inggris, dan prancis. Penjajahan ini membawa dampak negatif bagi bangsa indonesia, seperti eksploitasi sumber daya alam, penindasan hak asasi manusia, pemecah belahan bangsa, dan penghancuran budaya.

Namun, di tengah-tengah penderitaan dan penjajahan tersebut, terdapat pula perlawanan dan perjuangan bangsa indonesia melawan penjajah. Beberapa contoh pahlawan yang berjuang melawan penjajah adalah Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Cut Nyak Dien, dan Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Mohammad Hatta, Bung Tomo. Perlawanan dan perjuangan ini menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi dari bangsa indonesia.

Selain itu, pada masa kolonial juga terdapat pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa contoh organisasi tersebut adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Organisasi-organisasi ini berperan dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia, menyebarkan kesadaran politik dan sosial, serta menggalang persatuan dan solidaritas di antara rakyat indonesia.

Salah satu tonggak penting dalam proses berbangsa indonesia pada masa kolonial adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar yang diucapkan oleh para pemuda-pemudi indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sumpah Pemuda berisi tiga butir sumpah, yaitu:

- 1) Kami putra-putri indonesia mengaku bertumpah darah yang satu: tanah air indonesia.
- 2) Kami putra-putri indonesia mengaku berbangsa yang satu: bangsa indonesia.
- 3) Kami putra-putri indonesia menjunjung bahasa persatuan: bahasa indonesia.

Sumpah Pemuda merupakan manifestasi dari kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah tumbuh di kalangan pemuda-pemudi Indonesia. Sumpah Pemuda juga menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia selanjutnya.

### **C. Masa Kemerdekaan**

Masa kemerdekaan adalah masa ketika bangsa Indonesia berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan asing dan menjadi sebuah negara merdeka yang berdaulat. Masa kemerdekaan dimulai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah pernyataan resmi yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia harus melakukan beberapa langkah penting dalam proses berbangsa dan bernegara, antara lain:

#### **1. Perumusan Dasar Negara Dan Konstitusi**

Dasar negara adalah ideologi atau falsafah yang menjadi landasan bagi negara dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang tertinggi yang mengatur tentang bentuk dan susunan negara serta hak dan kewajiban warga negara. Dasar negara dan konstitusi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila adalah lima sila atau prinsip yang menjadi acuan bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. UUD 1945 adalah hasil dari perumusan oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari sembilan tokoh pergerakan nasional, yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Agus Salim, Ahmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Wachid Hasyim. UUD 1945 mengatur tentang bentuk negara Indonesia sebagai

negara kesatuan yang berbentuk republik, sistem pemerintahan presidensial, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi angkatan perang, serta hak-hak dan kewajiban dasar warga negara.

## 2. Perang Kemerdekaan Melawan Belanda Dan Sekutu

Perang kemerdekaan adalah perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda dan Sekutu. Perang kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 hingga 1949 dengan beberapa fase, yaitu: Agresi Militer I (1947), Agresi Militer II (1948), dan Perundingan Meja Bundar (1949). Perang kemerdekaan menimbulkan banyak korban jiwa dan materi di kedua belah pihak, tetapi juga menumbuhkan semangat juang dan solidaritas di antara rakyat Indonesia. Beberapa contoh pertempuran heroik dalam perang kemerdekaan adalah Pertempuran Surabaya (10 November 1945), Pertempuran Ambarawa (12-15 Desember 1945), Pertempuran Medan Area (15 Juli-18 Agustus 1947), Pertempuran Lengkong (23 Maret 1948), Pertempuran Bandung Lautan Api (23-24 Maret 1946), Pertempuran Lima Hari di Semarang (14-19 Oktober 1945), dan Pertempuran Bukit Jatiwangi (19 Desember 1948).

## 3. Pengakuan Kedaulatan Indonesia Oleh Dunia Internasional

Pengakuan kedaulatan adalah pengakuan oleh negara-negara lain bahwa suatu negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia internasional terjadi setelah perundingan Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Dalam perundingan tersebut, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka yang berdaulat atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Papua Barat. Pengakuan kedaulatan ini ditandai dengan penyerahan kedaulatan secara resmi oleh

Ratu Juliana dari belanda kepada Presiden Soekarno dari RIS di Istana Dam di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949.

#### 4. Percobaan Demokrasi

Pada 1950 dalam aspek politik, pemimpin-pemimpin Indonesia masih mencoba untuk menemukan sistem pemerintahan yang cocok untuk negara yang baru merdeka ini. Salah satunya adalah sistem pemerintahan yang menganut demokrasi, tetapi sistem demokrasi liberal parlementer yang dicoba pada akhirnya kurang cocok dengan kebutuhan bangsa dan berakhir di tahun 1957. Kegagalan percobaan demokrasi ini disebabkan problem-probel internal seperti korupsi, kekuasaan yang otoriter dan paternalistis dan masalah ekonomi.

Pada 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menetapkan pembubaran Konsitutante, pemberlakuan kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950 dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Bagi Sukarno, sistem Demokrasi Terpimpin merupakan suatu usaha untuk menata ulang politik dan pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Sistem Demokrasi Terpimpin berlangsung antara 5 Juli 1959, ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan, dan 11 Maret 1966, ketika Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret.

Di bawah Demokrasi Terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk sementara ketegangan politik meningkat. Demokrasi Terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965.

#### 5. Irian Barat

Irian barat yang kini dikenal sebagai papua, merupakan bagian dari mosaik keberagaman budaya dan sejarah indonesia yang memiliki dinamika unik dalam konteks kolonialisasi. Meski berbagai kekuatan eropa berusaha menguasainya, belanda yang akhirnya mendominasi wilayah ini hingga pertengahan abad ke-20 dengan pendirian pos-pos

pemerintahan, pendekatan sosial kultural melalui misionaris, dan pemberdayaan struktur pemerintahan adat lokal.

Namun, perlawanan dan semangat kebangsaan masyarakat lokal, bersama dengan diplomasi indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan, berhasil mengakhiri dominasi belanda, menyatukan irian barat kembali ke dalam pangkuan nusantara, meski tantangan-tantangan baru masih menanti.

Dalam retrospeksi, konfrontasi antara indonesia dan belanda mengenai irian barat merupakan salah satu contoh bagaimana aspirasi nasionalisme, geopolitik global, dan diplomasi internasional berperan dalam menentukan nasib sebuah wilayah. Meskipun ada banyak tantangan dan hambatan, tekad indonesia untuk mengintegrasikan irian barat ke dalam wilayahnya menunjukkan komitmen negara ini untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya.

#### 6. Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Sejarah konfrontasi indonesia-malaysia diawali oleh pernyataan Tengku Abdul Rahman tentang keinginannya membentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei, Serawak, dan Sabah.

Pernyataan ini langsung ditolak oleh Presiden Soekarno yang menganggap keberadaan federasi merupakan ulah inggris yang ingin membuat negara boneka neo-kolonialisme yang bisa membahayakan indonesia. Keberadaan Federasi Malaysia pun dilihat oleh Soekarno sebagai upaya untuk memperkuat dominasi Inggris di wilayah Asia Tenggara.

konflik indonesia dan malaysia yang terus memanas, sehingga indonesia melakukan politik luar negerinya dengan mengambil langkah perundingan dengan malaysia. Langkah politik luar negeri yang dilakukan indonesia-malaysia terjadi 7 perundingan yang cukup panjang.

Perundingan yang di mulai tahun 1963-1966. Tahun 1963-1964 terjadi 6 kali perundingan yang menghasilkan kebuntuan diantara kedua

belah pihak. Sikap konfrontasi diambil demi menegakkan kedaulatan indonesia. Baru tahun 1966 di Bangkok perundingan tersebut selesai yang mana wilayah sabah dan serawak masuk ke dalam wilayah malaysia.

#### 7. Gerakan 30S/PKI 1965

Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta ingin merubah negara indonesia menjadi sistem komunis. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu adalah ketua dari PKI atau Partai Komunis Indonesia.

Gerakan tersebut dimulai dari Kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Pada awalnya mereka mengincar Perwira Tinggi dan Dewan Jenderal. Awal mula dari gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para Jenderal dan juga Perwira ke Lubang Buaya. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit daro Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Perwira Tinggi dan juga Jenderal yang mereka bawa ke Lubang Buaya. Berikut enam perwira yang menjadi korban dari gerakan ini adalah : Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jendral Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

## **STUDI GENDER DAN KELEMBEGAAN KOPRI**

### **A. Sejarah Gender**

Sejak tahun 80an kata gender telah memasuki perbendaharaan dalam setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi nonpemerintah membicarakan masalah gender. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender itu? Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang maksud dari konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidaknya ada beberapa penyebab ketidakjelasan tersebut. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender. Sementara itu, belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting untuk memahami sistem ketidakadilan sosial.

Dengan kata lain, timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan. Untuk memahami konsep gender, kata gender harus dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum lakilaki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Sebaliknya, melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan memengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki hams bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender

yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena kaum perempuan hams lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga memengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukanlah kodrat.

Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender ini, yang menjadi masalah adalah, terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Dewasa ini di masyarakat terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya tentang pengertian yang sesungguhnya dari gender, karena konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat dan diartikan sebagai ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Padahal, sebagian besar dari sesuatu yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai "kodrat wanita" sebenarnya adalah konstruksi sosial dan kultur, atau gender. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan, dan keindahan rumah tangga, atau urusan domestik sering dianggap sebagai "kodrat wanita". Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai "kodrat wanita" atau "takdir Tuhan atas wanita" dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah gender.

Setelah jelas perbedaan antara konsep jenis kelamin (sex) dan gender, dapat diajukan pertanyaan mengapa perbedaan jenis kelamin harus melahirkan perbedaan gender? Apa permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender tersebut? Dengan kata lain, kalau perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dapat dibedakan dari perbedaan gender: bahwa kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, lemah lembut dan bahwa laki-laki memiliki sifat rasional, kuat, atau perkasa, lantas di mana letak masalahnya?

## **B. Kesetaraan Gender**

Tidak sedikit orang yang masih berpikir bahwa membicarakan kesetaraan Gender adalah sesuatu yang mengada-ada. Hal yang terlalu dibesar-besarkan. Kelompok orang yang berpikir konservatif seperti ini menganggap bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun dalam masyarakat memang harus berbeda.

“Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, percuma menghabiskan biaya saja, toh nantinya akan kembali juga masuk dapur”

Pernah mendengar ungkapan seperti itu? Hal ini masih kerap terlontar saat dipertanyakan apakah anak perempuan atau laki-laki yang akan diberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah. Dari ungkapan tersebut sudah dapat kita lihat ada dua hal yang mencerminkan tidak adanya kesetaraan Gender yaitu:

- Perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan lingkungannya.
- Laki-laki tidak diberikan penghargaan yang sama dengan perempuan jika mereka memilih 'masuk dapur'.

Pemikiran seperti ini umumnya muncul terutama pada kelompok masyarakat tradisional-patriarki yang masih menganggap bahwa sudah kodratnya perempuan untuk melakukan pekerjaan di dapur.

Sebagaimana yang telah dibahas di bagian muka buku ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa peran Gender tidak sama dengan kodrat. Bukan kodratnya perempuan untuk masuk dapur, karena kegiatan memasak di dapur tidak ada kaitannya dengan ciri-ciri biologis yang ada pada perempuan. Kegiatan memasak di dapur (atau kegiatan domestik lainnya) adalah suatu bentuk pilihan pekerjaan dari sekian banyak jenis pekerjaan yang tersedia (misalnya guru, dokter, pilot, supir, montir, pedagang, dll), yang tentu saja boleh dipilih oleh perempuan ataupun laki-laki. Kesetaraan Gender memberikan pilihan, peluang dan kesempatan tersebut sama besarnya pada perempuan dan laki-laki. Supaya lebih jelas bagaimana kita bisa melihat kesetaraan Gender terjadi dalam lingkup kegiatan sehari-hari, berikut ilustrasi sederhana yang terjadi pada dua keluarga :

Yang pertama adalah seorang istri yang memilih bekerja di rumah dan suaminya memilih bekerja buruh di pabrik. Pada saat mengambil keputusan di keluarga, istri bebas menentukan apakah dia ingin bekerja di luar atau di dalam rumah. Demikian juga sang suami tidak keberatan untuk bertukar peran suatu saat istrinya mempunyai kesempatan bekerja di pabrik. Dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa telah tercipta kesetaraan Gender di dalam keluarga tersebut. Istri tidak dipaksa suami untuk tinggal di rumah dan suami tidak diharuskan bekerja di pabrik. Mereka memilih peran tersebut atas dasar kemampuan dan keinginan masing-masing pihak, tidak ada paksaan ataupun tekanan dari istri maupun suami. Kesetaraan Gender tercipta manakala istri dan suami mempunyai peluang yang sama untuk memilih jenis pekerjaan yang disukainya dan mempunyai posisi yang sama saat mengambil keputusan dalam keluarga.

Yang kedua, adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai pengacara. Orang menganggap dia sudah sadar Gender, berpikiran modern dan sudah menikmati kesetaraan Gender dalam keluarganya. Penampilannya yang tegas dan gaya bicaranya lantang di depan publik, seolah-olah telah menghapus bayangan stereotype perempuan tradisional. Padahal yang terjadi sebenarnya

adalah dia tidak memilih pekerjaan menjadi pengacara, melainkan terpaksa menjadi pengacara karena suaminya seorang pengusaha yang menginginkan sang istri menangani urusan-urusan hukum dengan klien-klien bisnisnya. Sang istri selalu bekerja dibawah tekanan suami, tidak mempunyai kebebasan mengeluarkan pendapatnya dan tidak mempunyai kesempatan untuk memilih pekerjaan lain yang diinginkannya.

Kita seringkali membuat dan menilai sesuatu hanya dari penampakan luarnya saja. Demikian pula halnya dengan kesetaraan Gender. Orang sering menghubungkan-hubungkan kesetaraan Gender dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Namun, melihat contoh kedua keluarga di atas, jelas bagi kita bahwa jenis pekerjaan seseorang ataupun tempat bekerja yang dipilih oleh seseorang bukanlah ukuran yang dapat menunjukkan adanya kesetaraan Gender. Kesetaraan Gender ditunjukkan dengan adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan di dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Kesetaraan Gender memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki-laki dalam menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuannya secara maksimal di berbagai bidang. Tidak peduli apakah dia seorang ibu rumah tangga, presiden, buruh pabrik, supir, pengacara, guru ataupun profesi lainnya, jika kondisi-kondisi tersebut tidak terjadi pada dirinya maka dia tidak dapat dikatakan telah menikmati adanya kesetaraan Gender.

Di lain pihak, berkembangnya isu Gender di masyarakat dan maraknya inisiatif-inisiatif yang memperjuangkan kesetaraan Gender juga memicu sebagian orang menjadi berpikir dikotomis. Yang dimaksud adalah cara berpikir yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada dua kubu yang berseberangan. Perempuan ditempatkan pada kubu yang teraniaya dan lemah, sedangkan laki-laki dipandang sebagai kubu penguasa yang menjajah perempuan. Hasil dari pemikiran seperti ini tidak akan memunculkan perilaku sadar Gender dan tidak akan mendukung ke arah terjadinya kesetaraan Gender.

Yang akan muncul justru “perang” antara perempuan pada kubu “teraniaya” yang merasa terjajah, ingin memberontak dan menguasai laki-laki, sementara kaum laki-laki pada kubu “penguasa” yang takut kekuasaannya diambil dan selalu khawatir terhadap dominasi kaum perempuan. Yang terjadi selanjutnya adalah terjadinya pertarungan antara kubu perempuan dan laki-laki tanpa jelas apa yang sebenarnya diperdebatkan. Kondisi seperti ini tentunya tidak mendukung sama sekali pada tujuan utama kita membicarakan “kesetaraan Gender”. Terminologi “kesetaraan Gender” seringkali disalahartikan dengan mengambil alih pekerjaan dan tanggung jawab laki-laki.

*“Katanya mau disamakan dengan laki-laki, kalau begitu panjat atap dan betulkan genting yang bocor, saya tidak perlu melakukan pekerjaan itu lagi sekarang....”*

Bukan hanya sekali atau dua kali ungkapan seperti itu muncul dalam forum diskusi mengenai Gender. Kondisi seperti ini menyiratkan adanya kesimpangsiuran dalam memaknai kesetaraan Gender. Kesetaraan Gender bukan berarti memindahkan semua pekerjaan laki-laki ke pundak perempuan, bukan pula mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami oleh istrinya. Jika hal ini yang terjadi, bukan 'kesetaraan' yang tercipta melainkan penambahan beban dan penderitaan pada perempuan. Inti dari kesetaraan Gender adalah menganggap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (equality), baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mereka berkuasa, merasa lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lainnya.

Singkatnya, inti dari kesetaraan Gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari lingkungan. Bukankah keseimbangan selalu menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik?

## **C. Sejarah Kopri PMII**

### **1. Kopri (Kopr PMII Putri)**

Pada saat PMII didirikan Kopri memang belum ada. Yang ada hanya divisi keputrian. Hal ini bukan lantaran peran perempuan sangat kecil, melainkan lebih dikarenakan kepraktisan semata. Maksudnya dalam divisi keputrian ini dikalangan perempuan PMII bisa lebih fokus memusatkan perhatiannya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan dunianya. Sayang, saat itu dunia perempuan hanya sebatas menjahit, memasak dan dapur.

Dalam divisi keputrian tadi, yang menangani semua permasalahan didalamnya tentu saja harus perempuan. Namun walau demikian tidak menutup kemungkinan perempuan menempati posisi di struktur PMII. Tapi lagi-lagi karena kesiapan SDM dan profesionalitas perempuan yang kurang menyebabkan jumlah mereka secara kuantitas masih sedikit. Dimaklumi, karena waktu itu memang sangat sedikit kaum perempuan yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kondisi yang terjadi saat itu antara laki-laki dan perempuan saling bahu-membahu (guyub) dalam menutupi kekurangan di organisasi. Termasuk pula guyub dalam pengambilan keputusan serta beberapa hal yang mengharuskan mereka bekerja sama mempertaruhkan nama organisasi.

Lahirnya Kopri berawal dari keinginan kaum perempuan untuk memiliki ruang sendiri dalam beraktifitas, sehingga mereka dapat bebas mengeluarkan pendapat atau apapun. Keinginan tersebut didukung sepenuhnya oleh kaum laki-laki saat itu. Corps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Poetri (COPRI) lahir pada tanggal 25 November 1967 di Semarang, dengan status semi otonom yang sebelumnya merupakan follow up atas dilaksanakannya Training Kursus keputrian di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1966 yang melahirkan Panca Norma KOPRI. Ini mengisyaratkan bahwa kaum NU-PMII yang didominasi laki-laki memberi keleluasaan kepada kaum puteri PMII untuk beraktualisasi dalam wadah tersendiri. Disini NU juga membuktikan

bahwa NU yang terkenal “tradisionalis patriarchal” dan membelenggu perempuan bisa terejawantahkan.

## **2. *Historis Lahirnya Struktur KOPRI***

Perkembangan kuantitas dan kualitas yang maju, menimbulkan keinginan yang tidak terbendung untuk mendirikan Kopri sebagai otonom di PMII. Kemudian sebagai upaya peningkatan partisipasi perempuan serta pengembangan wawasan ke wilayah kerja-kerja sosial kemasyarakatan. Bentuk dan perkembangan struktur itulah yang kemudian kita mengenal adanya PB, PKC, PC, hingga PK, PR (dulu bernama anak cabang atau ranting). Dorongan dibentuknya Kopri sebagai organ otonom PMII adalah merupakan keinginan sahabat-sahabat dan kebulatan tekad yang teguh bahwa perempuan cukup mampu dalam menentukan kebijakan tanpa mengekor kepada laki-laki-laki.

## **3. *Rancangan Bangun KOPRI***

Kondisi gerakan perempuan pada saat berdirinya Kopri baru sebatas emansipasi perempuan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Misalnya di NU, kita mengenal Muslimat yang hanya mengadakan kegiatan pengabdian sosial kemasyarakatan. Dalam tahap awal berdirinya, KOPRI banyak mengadopsi dan melakukan kerjasama dengan Muslimat, serta beberapa organisasi perempuan lain yang sudah lebih dahulu ada saat itu, seperti Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) maupun Korp HMI-Wati (KOHATI). Pada saat pertama kali berdiri, sebagaimana organisasi perempuan yang ada pada waktu itu, KOPRI hanya semata-mata sebagai wadah mobilisasi perempuan. Alasan mengapa ada KOPRI tak lain karena dirasa perlu untuk mengorganisir kekuatan perempuan PMII untuk bisa menopang organisasi yang menaunginya (PMII). Hal ini seperti juga terjadi di organisasi-organisasi lain baik organisasi mahasiswa, ormas keagamaan, dan organisasi politik.

Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya menunjukkan hubungan yang dianggap problematis. Dengan gagasan otonomisasi di tingkat pusat (Pengurus Besar) sekilas nampak dualisme organisasi, karena KOPRI memiliki program terpisah dan kebijakan yang berbeda dari PMII. Beberapa kalangan menganggap perkembangan ini sebagai suatu yang positif, karena KOPRI telah

bergerak dari organisasi dengan pola ketergantungan terhadap PMII menuju organisasi yang mandiri. Sedangkan kalangan lain menanggapi dengan nada minor, karena KOPRI dianggap melakukan pelanggaran konstitusi dan telah menjadi kendaraan politik menuju posisi strategis di PMII.

Arus gerakan perempuan pada umumnya sangat memberi warna pada perkembangan yang terjadi dalam KOPRI. Untuk menjelaskan bagaimana realitas kondisi KOPRI, tidak lepas dengan bagaimana paradigma gerakan perempuan di Indonesia.

Yang perlu diketahui lagi bahwa historis struktural yang mendorong lahirnya KOPRI sebagai organisasi ekstra kampus yang nota bene merupakan kumpulan intelektual muda, dimana pada perkembangan awalnya perempuan di PMII masih termasuk dalam bidang keputrian. Tapi dengan kebutuhan serta didukung adanya kualitas dan kuantitas yang ada, menimbulkan keinginan yang tidak terbendung untuk mendirikan KOPRI sebagai otonom di PMII. Alasannya adalah sebagai upaya guna peningkatan partisipasi perempuan serta pengembangan wawasan wilayah-wilayah kerja sosial kemasyarakatan.

Orientasi pemikiran sahabat-sahabat pendiri waktu itu dengan dibentuknya KOPRI sebagai organ otonom PMII adalah merupakan keinginan sahabat-sahabat dan kebulatan tekad yang teguh bahwa kaum perempuan cukup mampu dalam menentukan kebijakan. Hal ini bukan berarti KOPRI terpicu oleh keinginan pragmatis dengan berkaca dari organisasi lainnya.

Walaupun KOPRI merupakan bagian dari lingkungan NU dan saat itu masih menjadi partai, tetapi tidak ada kaitannya sama sekali. Dengan terbentuknya KOPRI, baik itu alasan politis, kepentingan sesaat, maupun tanggapan ideologi, sekalipun NU merupakan parpol. Pada saat orde baru di bawah kepemimpinan Suharto, trend isu serta suara perempuan pada saat itu turun tensinya dan menuju pada titik kulminasi terendah, sangat melemah. Kondisi saat itu dihisap oleh keberadaan penguasa yang dikenal otoriter serta menghegemoni seluruh kekuatan yang ada di masyarakat. Namun walaupun demikian itu bukanlah masalah yang berarti bagi KOPRI, karena PMII memiliki pola dan karakter gerakan yang massif-agresif, keterpurukan KOPRI

itu bisa tertutupi dengan baik. Pada saat kepemimpinan Sahabati Khofifah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1991 mengenai Nilai Kader KOPRI dan pada saat itu pula kaderisasi KOPRI telah dibentuk pola pengkaderan yang sistematis yaitu dibentuk sistem kaderisasi yang terdiri dari Kurikulum dan Pedoman Pelaksanaan LKK (Latihan Kader KOPRI) serta petunjuk pelaksana Latihan Pengkaderan KOPRI, dalam hal jenjang pengkaderan KOPRI dibagi menjadi 2 tahap yaitu LKK (Latihan Kader KOPRI) dan LPKK (Latihan Pelatih Kader KOPRI), ini adalah satu bentuk kemajuan kepengurusan KOPRI dari waktu ke waktu.

PMII secara institusi selalu selangkah lebih maju dengan rekapitalisasi gerakan. Tidak demikian dengan KOPRI yang dirasakan justru kehilangan orientasi, dan mengalami distorsi paradigma gerakan yang dibangun pada saat itu. Tapi karena hubungan antara KOPRI-PMII baik-baik saja, maka secara personal sahabat-sahabat perempuan KOPRI masih sering diajak berurunberembug, berdiskusi, atau dilibatkan dalam beberapa kegiatan.

Secara struktural KOPRI didalam institusinya berstatus semi otonom atau bagian integral dan tidak terpisahkan dari wadah utamanya yaitu PMII. Lewat semua itu, KOPRI banyak belajar dan menyadari betul tentang perlu adanya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan. Dan performance pemimpin sangat mempengaruhi gerak dan aktifitas organisasi.

Klaim tentang kesadaran gender pada PMII membangun argumentasi bahwa pembubaran KOPRI merupakan suatu keharusan. Karena KOPRI hanya mengakibatkan eksklusifitas perempuan di PMII. Organisasi perempuan sebagai subordinat dari organisasi lain dianggap memberi legitimasi terhadap stereotyp perempuan sebagai makhluk subordinat dan kontra produktif terhadap gerakan perempuan untuk penyadaran, kesetaraan, pemberdayaan akses dan advokasi perempuan. Cabang-cabang KOPRI yang membuat keputusan untuk meleburkan diri dengan PMII bereksperimen untuk berkompetisi dengan warga PMII lainnya dengan mengandalkan seleksi alam. Kader KOPRI dilanda syndrome inferior untuk menamakan diri sebagai bagian dari KOPRI. Mereka lebih nyaman menjadi PMII atau menjadi bagian dari wadah lain (asal bukan

KOPRI). Disisi lain adalah fenomena kemandegan KOPRI, dimana eksis secara struktur tapi tidak melakukan apa-apa dan beberapa cabang KOPRI yang merasa tidak terganggu dan enjoy menjadi bagian dari PMII dengan alasan adanya sinergitas antara PMII dan KOPRI.

#### **4. Pembubaran KOPRI**

Tidak dipungkiri bahwa pembubaran KOPRI pada Kongres XIII di Medan tahun 2000 merupakan salah satu pengaruh dari euforia gerakan kesadaran gender. Selama ini kita merasakan tampak kesenjangan-kesenjangan, tidak hanya antara kader laki-laki dan perempuan, tetapi juga antar daerah. Memang terdapat beberapa eksperimentasi yang dilakukan oleh sebagian kecil daerah (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dengan menafsirkannya dalam bentuk jaringan gender sementara daerah lain menjadi tampak kesulitan. Hal ini karena pembubaran KOPRI tidak dibarengi dengan usaha institusionalisasi yang serius ke arah penataan kelembagaan. Sehingga secara institusional yang terjadi bukan memperteguh pemberdayaan kader putri, tetapi meluluh lantakannya kembali ke titik nol. Maka bukan hal yang mustahil manakala ditengah lemahnya mobilitas sosial dan aktualisasi diri kader putri yang secara sosiologis berlatar rural (pedesaan) ada kecurigaan bahwa pembubaran KOPRI adalah “Patriakhal Conspiracy”. Ibarat perang, kader putri yang memang “dilemahkan berangkat ke medan konstantasi”. Mengambil pilihan liberal atau kontestasi bebas ditengah kader yang tidak seimbang oleh kondisi sosial yang timpang/serbalaki-laki memang terlihat naif karena dengan begitu akan menimpakan masalah ketimpangan pada perempuan yang sesungguhnya juga adalah korban. Hal tersebut, sesuai pengakuan salahsatu pelaku sejarah kongres Medan, bahwa Ia hadir ke forum kongres hanya untuk sekedar membubarkan KOPRI. Padahal menurutnya, ia tidak tahu KOPRI karena posisinya baru pengurus komisariat.

Untuk menunjukkan bahwa PMII adalah organisasi pro-demokrasi dan HAM sehingga tidak memandang laki-laki dan perempuan secara dikotomis. Akan tetapi argumentasi kesadaran gender di PMII terjadi bersamaan dengan fenomena-fenomena sebagai berikut: pertama, marginalisasi perempuan di

kepengurusan PMII di setiap level kepengurusan. Kedua, munculnya krisis kader perempuan dalam PMII yaitu terjadinya gap antara jumlah anggota perempuan yang aktif dengan jumlah anggota yang pasif. Pada saat dilakukan MAPABA di PMII biasanya separoh atau lebih merupakan kader perempuan. Mayoritas dari mereka hanya sempat mengikuti MAPABA, dan setelah itu seleksi alam akan menentukan apakah seorang kader perempuan akan bertahan atau tidak. Ketiga adalah kader putri yang melakukan pembaharuan melalui KOPRI terutama di PB KOPRI dan cabang-cabang PMII yang masih mempertahankan KOPRI. Aktifitas KOPRI melihat bahwa di tubuh PMII kesadaran gender terjadi bersamaan dengan ketimpangan gender yang tercermin dari ketidakjelasan kebijakan PMII terhadap kader perempuan yang jumlahnya melebihi 50% dari kader PMII seluruhnya. Hal ini disebabkan karena PMII merupakan organisasi secara idealitas tidak membedakan kader laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ditingkat realitas menunjukkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kader perempuan PMII tidak memiliki landasan konstitusional yang jelas dalam memperjuangkan aspirasi perempuan.

#### **5. Menghidupkan Kembali Lembaga KOPRI**

Berdasarkan forum musyawarah yang diamanatkan oleh Kongres XIV di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur untuk membuat pertemuan POKJA Perempuan PMII pada tanggal 26-29 September 2003 yang menghasilkan ketetapan bahwa dibentuk kembali keorganisasian wadah perempuan yang bernama KOPRI (Korps PMII Putri) yang merupakan bagian integral dengan PMII di Jakarta pada tanggal 29 September 2003 dimana PB KOPRI berpusat di Jakarta. Dengan visi terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan misinya adalah mengidiologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender. Ketika PMII berusaha untuk memaksimalkan kader-kader perempuan PMII untuk mampu bersaing dan mandiri dengan membentuk badan semi otonom yaitu KOPRI, tetapi keberadaannya tidak dapat dirasakan oleh kader-kader PMII

secara keseluruhan baik itu laki-laki maupun perempuan apalagi masyarakat yang lebih luas, keberadaan KOPRI seperti “Hidup segan mati tak mau”. Masing-masing daerah belum terkonsentrasi dalam hal sistem kaderisasi KOPRI karena minimnya pemahaman mengenai KOPRI itu sendiri, padahal pada masa kepemimpinan Sahabati Khofifah sudah dibentuk Latihan Kader KOPRI (LKK) dan Latihan Pelatih Kader KOPRI (LPKK), namun seiring berjalannyawaktu sampai akhirnya KOPRI dibubarkan, kaderisasi tidak jelas baik kegiatannya maupun dokumentasi dari buku panduan kaderisasi.

Pasca KOPRI dibentuk kembali baru dimasing-masing daerah membentuk sistem kaderisasi KOPRI sendiri dengan mengikuti perkembangan waktu dan pemahaman dari setiap kader di daerah, seperti di KOPRI PKC Jawa Barat membentuk sistem kaderisasi KOPRI yang dikenal dengan SKK (Sekolah Kader KOPRI) : SKK I, SKK II, dan SKK III mengikuti jenjang pendidikan formal di PMII. Kemudian KOPRI PC Kota Malang membentuk sistem kaderisasi KOPRI yang dikenal dengan SKP (Sekolah Kader Putri): SKP I, SKP II dan SKP III begitupun KOPRI PC. Kota Malang mengikuti jenjang pendidikan formal di PMII.

## **6. Visi Misi KOPRI**

Visi KOPRI adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Misi KOPRI adalah mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender.

## **7. Tujuan KOPRI**

- a. Menciptakan kader ulul albab.
- b. Penguatan intelektual dan kemandirian kader
- c. Mecetak kader yang memiliki loyalitas dan kesetiaan terhadap organisasi.
- d. Membentuk kader yang militan dan memiliki komitmen terhadap pergerakan.
- e. Membentuk kader pelopor, pembaharu dan creator.

## **8. Fungsi KOPRI**

- a. KOPRI berfungsi sebagai wadah bagi gerakan perempuan muslimah masa kini.
- b. KOPRI berperan menjadi pembawa nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdhiyyah
- c. KOPRI turut mendukung kebijakan yang pro rakyat
- d. KOPRI berfungsi sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten kebersamai
- e. masyarakat dalam berbagai isu

## **9. Nilai Kader KOPRI (NKK)**

Nilai Kader KOPRI atau biasa disingkat dengan NKK merupakan sebuah sarana kader KOPRI untuk mengenal, melihat dirinya sendiri dan bahkan mengharapkan yang lain untuk melihat. NKK juga merupakan potret yang diharapkan kepada kader puteri. Untuk menjawab pertanyaan “Siapa saya ini” maka NKK mengembangkan sebagai berikut :

- a. Warga KOPRI sebagai insan individu harus dipenuhi dengan muatan religiusitas karena islamnya, harus dipenuhi dengan muatan intelektualitas karena mahasiswa, dan juga harus dipenuhi dengan muatan kemandirian karena kedewasaannya.
- b. Warga KOPRI sebagai makhluk sosial, tanpa membedakan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta melihat dimensi ruang dan waktu.
- c. Warga KOPRI sebagai insan organisasi, harus mengembangkan sikap profesionalitas dalam menjalankan aktifitas.

## **10. Fungsi Nilai Kader KOPRI (NKK)**

- a. Sebagai justifikasi terhadap kritik sosial dan tertib organisasi yang mensyaratkan pada anggota untuk menerima sebagai konstruk yang sah dan dianggap vital dan secara moral mengikat. Jadi setiap tindakan harus berada dibalik legitimasi NKK.
- b. Mampu menumbuhkan “sense of belonging” (rasa memiliki) warga terhadap organisasi yang mempertautkan kolektifitas masa lampau

sekaligus diarahkan pada masa depan sebagai instrumen identifikasi diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

- c. Sebagai pedoman yang memberikan wawasan mengenai misi dan tujuan organisasi sekaligus merupakan komitmen untuk bertindak.

## **ANTROPOLOGI KAMPUS**

### **A. Pengertian Antropologi**

Antropologi kampus pada dasarnya berusaha menjelaskan bagaimana kehidupan (manusia) dalam lingkungan kampus, khususnya mahasiswa sebagai pemeran utama Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu : Anthropos dan Logos, Anthropos yang berarti manusia dan Logos berarti ilmu, sederhananya, Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. David E Hunter dalam *The Study Of Anthropology* (1976) menjelaskan, Antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari adanya keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Koentjaraningrat (Bapak Antropolog Indonesia) Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu apa-apa yang berkaitan dengan manusia baik berupa fisik maupun budaya sehingga dapat disimpulkan kecenderungan manusia sebagai makhluk sosial.

### **B. Pengertian Kampus**

Kampus berasal dari bahasa Latin; campus yang berarti “lapangan luas”. Dalam pengertian modern, kampus berarti, sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi. Kampus sendiri berfungsi sebagai tempat belajar, baik belajar ilmu pengetahuan maupun pengembangan skill. Maka dari itu kampus sangat beda dengan sekolah, dimana kampus membebaskan mahasiswanya untuk berani berekspresi, berpendapat, berkreasi guna mengasah kemampuan mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik. Sudah menjadi kewajiban dalam setiap kampus (perguruan tinggi) disetiap kebijakan dan kurikulum yang berada harus sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam sejarahnya dimana perguruan tinggi di Indonesia sudah ada sejak awal abad ke-20. Namun cikal bakal perguruan tinggi di Indonesia sudah disemai sejak abad ke-19 yang dirintis oleh kolonial. Peralihan masa kekuasaan, membuat arah gerak

perguruan tinggi semakin tidak menentu. Standar kurikulum perguruan tinggi yang dibuat Belanda ketika berkuasa, telah dihilangkan oleh kekuasaan Jepang.

Pada 1 april 1945 menjelang Jepang bertekuk lutut kepada sekutu, tokoh-tokoh masjoemi berhasil mendirikan perguruan tinggi di Jakarta yang bernama STI (Sekolah Tinggi Islam). Dalam setiap geraknya Perguruan Tinggi di Indonesia selalu melibatkan masyarakat luas. Menyatunya antara masyarakat dan perguruan tinggi kemudian dilembagakan dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma berasal dari bahasa sansekerta tri yang berarti tiga, dharma yang berarti kewajiban. Isi dari Tridharma tersebut tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dan telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1961. Tujuan dari Tridharma tersebut sebagai berikut :

1. Dharma Pendidikan Pengajaran Dharma Pendidikan Pengajaran adalah kegiatan yang mengutamakan proses ilmu pengetahuan baik bersifat teori maupun praktek di dalam lingkungan perguruan tinggi. Yang melibatkan Kurikulum, Sarana prasarana pendidikan, dosen, mahasiswa, pegawai administrasi dan lain sebagainya.
2. Dharma Penelitian dan Pengembangan Dharma Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menciptakan atau mengembangkan sesuatu pada bebrbagai aspek yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat terutama untuk kemajuan bangkasa dan negara. Disini Mahasiswa harus kreatif, inovatif, aktif, dan kritis.
3. Dharma Pengabdian Pada Masyarakat Pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya membantu masyarakat agar masyarakat mau dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun tidak hanya sampai disitu saja, Mahasiswa sebagai agen dari perubahan juga merupakan salah satu perwakilan rakyat dalam memberikan aspirasi, kehidupan, dan masalah yang dihadapi masyarakat. sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat lebih tepatnya peran yang dipegang oleh mahasiswa. Ilmu yang dipelajarinya di perguruan tinggi nantinya akan diterapkan ke dalam pengabdian masyarakat. Karena uang dari masyarakat juga untuk

memberikan perkuliahan kepada para mahasiswa karena melalui pajak pemerintah memberikan anggaran untuk Perguruan Tinggi yang sebaaimana mestinya diberikan kepada Mahasiswa melalui subsidi biaya pendidikan. Jadi memang seharusnya tugas mahasiswa mengabdikan kepada masyarakat.

### **C. Pengertian Mahasiswa**

Mahasiswa dipandang dari sisi legalitas ialah seorang yang menuntut ilmu dan sekaligus berada dalam fase atau tingkatan Perguruan Tinggi yang mana itu menunjukkan bahwa dia sudah dikatakan lebih tinggi dari Seorang Siswa, namun kenyataannya lebih dari itu, Mahasiswa tidak hanya dilihat dari legalitasnya semata melainkan bagaimana ia bisa lebih dewasa dari seorang Siswa, lebih aktif, lebih kritis solutif pada kondisi dan situasi di lingkungan kampus maupun Masyarakat. Dilihat dari kacamata sejarah, Mahasiswa adalah salah satu garda terdepan didalam peningkatan ke-Intelektualan maupun salah satu generasi yang mampu meneruskan estafet dari cita-cita sebuah Negara. Namun seringkali kita yang katanya Mahasiswa belum cukup mengerti dan paham bagaimana yang sebenarnya peran sebagai Mahasiswa itu sendiri. Sebagaimana definisi di atas, Mahasiswa merupakan anggota dari suatu masyarakat tertentu yang merupakan Elit Intelektual dengan tanggung jawab terhadap ilmu yang melekat pada dirinya. Karena merupakan anggota masyarakat yang memiliki identitas berada pada tataran elit 'karena kelebihan yang dimilikinya, dengan demikian, seorang Mahasiswa mempunyai suatu ciri khas fungsi, peran dan tanggung jawab.

Dari identitas dirinya tersebut, Mahasiswa juga mempunyai tanggung jawab Intelektual, tanggung jawab sosial dan Tanggung Jawab moral. Dari sinilah diketahui nilai nilai penting itu, Mahasiswa yang katanya garda terdepan reformasi pengalihan kekuasaan serta bukti nyata didalam mengemban amanahnya, sehingga dapat didetailkan bagaimana sesungguhnya Mahasiswa itu berperan. Dibawah ini, akan dijelaskan tugas dan fungsi dari mahasiswa.

### **1. Mahasiswa sebagai Agent of Change**

Mahasiswa bagaikan tombak Yang paling ampuh, tajam dan dipercaya. Inilah aset penting yang menjadi tulang punggung kemajuan Indonesia dimasa mendatang. Oleh karena itulah Mahasiswa diharapkan mampu untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya Bangsa dan daya fikir Intelektual muda Mahasiswa yang kritis solutif dan inovatif.

### **2. Mahasiswa sebagai Agent of Control Social**

Seperti yang telah dituliskan panjang dan lebar di atas, bagaimanapun seorang Mahasiswa pasti akan kembali dan terjun ke dalam Masyarakat, bagi yang berkuliah dekat dengan rumah atau berada dikampung halaman nya sendiri mungkin keadaan kuliah sambil bermasyarakat itu sudah biasa, lantas bagaimanakah bagi mereka yang merantau jauh dari kampung halamannya untuk kuliah?. Nah, ini tentunya sangatlah sulit, Karena ia akan kembali kemasyarakatnya dan tentu saja sejak awal meninggalkan kampung halama semua nya sudah berubah, akan tetapi bagaimanapun keadaan terbaru akan Masyarakat menjadi hal wajib untuk diketahui. Dalam keadaan seperti ini, Mahasiswa yang kritis dan peka terhadap lingkungan selalu tanggap dan sadar apabila terjadi gejolak dan perubahan pada Masyarakat. Tentunya ini semua dengan rasa peduli dan sikap sosialisnya sehingga Mahasiswa dapat menjaga kestabilan social.

### **3. Mahasiswa sebagai Agent of Innovation**

Menurut UU No. 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa Mahasiswa sebagai Agen Of Innovation tugasnya ialah memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan yang baru. Karena seiring dengan berjalannya waktu

perkembangan zaman pun akan turut berubah, Oleh karena itulah peran Intelektual muda Mahasiswa dibutuhkan.

#### **D. Tipologi Kampus**

Dalam kampus komponen atau civitas akademika yang meliputi rektor, pembantu rektor, dekan, dosen, pegawai, dan mahasiswa. Mahasiswa adalah komponen terpenting dalam dinamika kampus, karena memiliki kuantitas terbanyak. mahasiswa, anggota PMII harus mampu mengetahui dan memahami tipologi mahasiswa dimasa sekarang. Dari beberapa tipologi mahasiswa dapat digolongkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama berdasarkan mahasiswanya akademis, yang kedua berdasarkan mahasiswa organisataris seperti berikut ini :

##### **1. Akademis**

- a. Mahasiswa aktivis : mahasiswa seperti ini biasanya sering ikut dalam setiap kegiatan kampus. Mereka juga aktif dalam ruang dialektika kelas. Biasanya mahasiswa seperti ini merupakan anak organisasi.
- b. Mahasiswa apatis : mahasiswa seperti ini sering disebut juga mahasiswa kupu-kupu (kuliah pulang-kuliah pulang). Mereka lebih sering bersikap bodoamat terhadap kondisi social sekelilingnya.
- c. Mahasiswa individualis : mahasiswa seperti ini biasanya hanya mementingkan dirinya sendiri, dan tidak peduli dengan sekelilingnya. Mereka mau terlibat dalam kegiatan atau acara yang ada keuntungan baginya atau yang sesuai dengan pendiriannya.
- d. Mahasiswa konservatif : mahasiswa seperti ini merupakan mahasiswa yang sulit untuk menerima perbedaan, mahasiswa yang kaku, dan berpikiran pendek.
- e. Mahasiswa egois : mahasiswa ini hampir sama dengan mahasiswa konservatif, mahasiswa yang kaku, ambisius, dan ingin memaksakan kehendaknya untuk disepakati orang lain.

## **2. Organisatoris**

- a. Mahasiswa pemimpin : mahasiswa seperti ini biasanya memiliki pribadi yang bijak dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mampu mengayomi anggota dan mampu memposisikan dirinya sesuai tempatnya.
- b. Mahasiswa inisiator : mahasiswa seperti ini biasanya memiliki pemikiran yang bagus, dan sering menginisiasi suatu kegiatan atau agenda.
- c. Mahasiswa konseptor : mahasiswa seperti ini cenderung lebih suka berfikir dalam membuat teknis-teknis suatu kegiatan.
- d. Mahasiswa eksekutor : mahasiswa seperti ini lebih aktif gerakannya dan lemah dalam membuat konsep maupun menginisiasi suatu kegiatan.

Setelah mengetahui tipologi mahasiswa, diharapkan anggota PMII mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa sekaligus sebagai seorang organisatoris yang baik. Dimana anggota PMII memiliki jiwa social, peka terhadap sekitar, memiliki pemikiran yang kritis, dan menjadi pribadi bertanggung jawab.

## **E. PMII dan Kampus**

Mahasiswa dipandang dari sisi legalitas ialah seorang yang menuntut ilmu dan sekaligus berada dalam fase atau tingkatan Perguruan Tinggi yang mana itu menunjukkan bahwa dia sudah dikatakan lebih tinggi dari Seorang Siswa, namun kenyataannya lebih dari itu, Mahasiswa tidak hanya dilihat dari legalitasnya semata melainkan bagaimana ia bisa lebih dewasa dari seorang Siswa, lebih aktif, lebih kritis solutif pada kondisi dan situasi di lingkungan kampus maupun Masyarakat. PMII dan kampus tidak bisa dipisahkan, karena memiliki elemen yang sama yaitu mahasiswa. Sebagai organisasi ekstra kampus terbesar di Indonesia, PMII memiliki komitmen untuk mencetak anggota maupun kadernya sebagai pribadi yang berguna bagi agama, dan

bangsa. PMII merupakan organisasi kaderisasi yang lahir untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagai bagian dari elemen mahasiswa, PMII memandang sangat vital keberadaan kampus. tidak hanya semata-mata untuk tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai wahana untuk menempa dan mengembangkan bakat potensi yang dimiliki para anggotanya. Maka dari itu dalam setiap tahun PMII selalu mendelegasikan kaderkadernya untuk mengasah dan mengembangkan kemampuannya didalam kampus. Selain itu, PMII juga memiliki tugas untuk mengawal kebijakan kampus yang sesuai dengan nilai-nilai perguruan tinggi dan mengamalkan nilai-nilai PMII. Disamping memperjuangan dan mengamalkan nilai-nilai PMII didalam kampus, anggota PMII diharapkan ikut aktif dan berkontribusi dalam setiap kegiatan kampus baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

PMII dengan aktif selalu mendelegasikan anggota atau kadernya untuk terlibat dalam setiap kegiatan kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Selain sebagai ladang berproses untuk meningkatkan kualitas kader. Kegiatan kampus juga bertujuan untuk menguji kapasitas kader. Tidak jarang pula anggota ataupun kader PMII yang mengharumkan dan mengangkat derajat kampus karena kualitas yang dimiliki kader-kader PMII. Sebagai elemen dari mahasiswa, PMII memiliki tujuan untuk membentuk anggotanya sebagai pribadi bijak dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Serta mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan loyal terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan. Sesuai dengan prinsip-prinsip ahlussunnah waljama'ah, pancasila dan UUD 45.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfaz, Fauzan. 2006. "PMII dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan". Jakarta: PB PMII.

Dede Wiliam "Gender Bukan Tabu"

Hifni, Ahmad. 2016. "Menjadi Kader PMII". Tangerang: HARPERINDO.

Mansour Fakh "Analisis Gender & Transformasi Sosial"

"Modul kaderisasi pmii jatim"

"muspimnas Tulungagung pmii 2022"

<https://chanifzein.blogspot.com/2019/05/trilogi-pmii.html>

<https://nu.or.id/fragmen/sejarah-awal-perumusan-ndp-pmii-3-habis-CMFNZ>

<https://www.indonesiana.id/read/156356/menakar-sejarah-singkat-terbentuknya-nilai-dasar-pergerakan-ndp-pergerakan-mahasiswa-islam-indonesia-pmii>

[https://an-nur.ac.id/blog/proses-berbangsa-indonesia-dari-masa-pra-kolonial-hingga-masa-kemerdekaan-sebuah-kajian-sejarah-dan-pancasila.html#google\\_vignette](https://an-nur.ac.id/blog/proses-berbangsa-indonesia-dari-masa-pra-kolonial-hingga-masa-kemerdekaan-sebuah-kajian-sejarah-dan-pancasila.html#google_vignette)

[https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Demokrasi\\_Terpimpin](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Demokrasi_Terpimpin)

## **LAGU-LAGU**

### **HYMNE PMII**

Bersemilah, bersemilah tunas PMII  
Tumbuh subur, tumbuh subur kader PMII  
Masa depan di tanganmu untuk  
meneruskan perjuangan  
Bersemilah, bersemilah kau harapan bangsa  
Bersemilah, bersemilah tunas PMII  
Tumbuh subur, tumbuh subur kader PMII  
Masa depan di tanganmu untuk meneruskan  
perjuangan  
Bersemilah, bersemilah kau harapan  
Bangsa.

### **BURUH TANI**

Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota  
Bersatu padu rebut demokrasi  
Gegap gempita dalam satu suara  
Demi tugas suci yang mulia  
Hari hari esok adalah milik kita  
Terciptanya masyarakat sejahtera  
Terbentuknya tatanan masyarakat  
Indonesia baru tanpa orba  
*Reff:*  
Marilah kawan mari kita kabarkan  
Di tangan kita terenggam arah bangsa  
Marilah kawan mari kita nyanyikan  
Sebuah lagu tentang pembebasan  
Di bawah kuasa tirani  
Kususuri garis jalan ini  
Berjuta kali turun aksi  
Bagiku satu langkah pasti  
Berjuta kali turun aksi  
Bagiku satu langkah pasti  
Bagiku satu langkah pasti.

### **MARS PMII**

Inilah kami wahai Indonesia  
Satu barisan dan satu cita  
Pembela bangsa penegak agama  
Tangan terkepal dan maju kemuka  
Habishlah sudah masa yang suram  
Selesai sudah derita yang lama  
Bangsa yang jaya Islam yang benar  
Bangun tersentak dari bumiku subur  
*Reff:*  
Denganmu PMII Pergerakanku  
Ilmu dan bakti kuberikan  
Adil dan makmur kuperjuangkan  
Untukmu satu tanah airku  
Untukmu satu keyakinanku  
Inilah kami wahai Indonesia  
Satu angkatan dan satu jiwa  
Putera bangsa bebas Merdeka  
Tangan terkepal dan maju kemuka

### **BERJUANGLAH PMII**

Berjuanglah PMII berjuang  
Marilah kita bina persatuan  
Berjuanglah PMII berjuang  
Marilah kita bina persatuan  
Hancur leburkanlah angkara murka  
Perkokohlah barisan kita  
Siap . . .  
Sinar api Islam kini menyala  
Tekad bulat jihad kita membara  
Sinar api Islam kini menyala  
Tekad bulat jihad kita membara  
Berjuanglah PMII berjuang  
Menegakkan kalimat Tuhan

